

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1. 1. Latar Belakang

Filosofi pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang di rumuskan oleh para Founding Father (Pendiri Bangsa) berakar pada nilai-nilai luhur, cita-cita bersama dan perenungan mendalam yang dirumuskan dalam lima sila dalam Pancasila. Tujuan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Makna dari Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu antara lain adalah keutuhan wilayah meliputi pulau-pulau, keutuhan khasanah budaya meliputi adat istiadat dan karya cipta, keutuhan bangsa meliputi suku-suku bangsa di seluruh wilayah NKRI, keutuhan sumber daya alam (SDA) meliputi kekayaan alam flora, fauna dan tambang, keutuhan penduduk atau sumber daya manusia (SDM) meliputi keutuhan manusianya, status keselamatan dan kesejahteraannya. Untuk mewujudkan keutuhan sumber daya alam dan keutuhan sumber daya manusia tersebut, maka sangat di perlukan kebijakan publik yang mengatur penggunaan dana publik yang ditujukan untuk mewujudkan keutuhan SDA dan keutuhan SDM menuju kesejahteraan

Proses dan pengaturan pengalokasian dana publik merupakan pendorong utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Penganggaran hijau bertujuan untuk memberikan para pengambil keputusan, parlemen dan masyarakat dengan pemahaman yang lebih jelas mengenai potensi tersebut dampak lingkungan dari pilihan penganggaran. Memiliki informasi lengkap mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan dapat menentukan peningkatan pendapatan dan alokasi sumber daya pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang dan pertimbangan mengenai keberlanjutan sumber daya. Meski begitu, ketersediaan data mengenai dampak lingkungan hidup pilihan anggaran dapat terbatas atau tidak digunakan secara sistematis. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam seluruh kebijakan domain anggaran, mulai dari lingkungan hidup dan iklim terhadap transportasi, kesehatan dan keuangan, akan mendukung penyelarasan insentif dan mengarah pada koheren pendekatan berbasis lingkungan dalam pembuatan kebijakan didukung oleh keputusan anggaran (Survey dan Budgeting, 2019).

Anggaran Berbasis Lingkungan mempunyai arti yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut tetapi tetap memberikan prioritas kepada pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur. Pada Daerah Otonomi Baru, arah kebijakan pembangunan daerah biasanya memprioritaskan kebutuhan dasar yang harus segera diantisipasi misalnya kemiskinan, kebodohan, kesehatan dan

keterisolasian, maka dipastikan bahwa pembangunan akan berfokus pada ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Arah kebijakan pembangunan tersebut akan sangat berdampak pada menurunnya tingkat kelestarian alam dan lingkungan.

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didasarkan pada asas otonomi dan tugas bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Berdasarkan pengertian tersebut maka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik melibatkan unsur : sumber daya manusia, anggaran, ruang (alam), bahan (material), cara (metode) dan mesin serta fungsi pengelolaan harus berorientasi pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu Urusan wajib bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah urusan Lingkungan hidup, urusan ini sifatnya wajib dilaksanakan untuk mewujudkan kelangsungan kelestarian alam dan lingkungan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan serta kebahagiaan semua makhluk.

Anggaran Berbasis Lingkungan memiliki arti sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah, karena dengan adanya kebijakan atas dukungan anggaran, maka urusan wajib pemerintahan bidang lingkungan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mencapai pelaksanaan urusan wajib bidang Lingkungan Hidup yang baik tersebut sudah tentu dibutuhkan keberpihakan dari para pemangku kepentingan untuk mengalokasikan anggaran yang mencukupi. Dalam upaya mendapatkan kebijakan yang berpihak terhadap urusan wajib bidang Lingkungan Hidup ini maka beberapa faktor hendaknya dimiliki oleh suatu wilayah dengan tingkatan pemerintahan dan para pejabat pengambil keputusan di bidang anggaran, misalnya (1). Wilayah pemerintahan tersebut harus memiliki sumber daya keuangan yang memadai, (2). Para pejabat pengambil keputusan di bidang anggaran hendaknya memiliki pemahaman yang memadai tentang fungsi lingkungan hidup, (3) Tingkatan wilayah pemerintahan tersebut memiliki seperangkat aturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mencermati kondisi awal lokasi penelitian, pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan yang dijadikan obyek penelitian belum secara jelas dan tegas memiliki seperangkat aturan yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat tentang alokasi jumlah dan/atau prosentase Anggaran yang berbasis Lingkungan. Kondisi ini juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lain dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan. Kondisi ini dikarenakan ketiadaan desain dan mekanisme yang terstruktur serta aturan yang berkekuatan hukum tetap yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran, khususnya memberikan alokasi anggaran

berbasis lingkungan.

Kebijakan anggaran berbasis lingkungan ditujukan sebagai salah satu instrumen mendukung kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan secara nasional, di mana tingkat kepedulian para pemangku kepentingan di daerah kemudian ditantang untuk mengeksekusi konsep anggaran berbasis lingkungan. Bagi pemangku kebijakan daerah, anggaran berbasis lingkungan adalah suatu seni memilih dan memilah prioritas program daerah, mana program daerah yang akan diberikan porsi yang lebih serta mana program daerah yang akan dipinggirkan. Jika konsep anggaran berbasis lingkungan hidup ini kemudian dijadikan role model di setiap daerah, tentunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak perlu bersusah payah mendorong daerah untuk memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan sekaligus mengubah cara pandang kebijakan selama ini dari top-down menjadi bottom-up.

Secara konseptual pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Manajemen urusan pemerintahan baik menyangkut unsur: man, money, material, method dan machine maupun fungsi manajemennya harus diorientasikan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dimana lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kebahagiaan masyarakat. Ketiadaan desain dan mekanisme yang terstruktur yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran. Konsep dan valuasi ABLH yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah sehingga mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Dasar hukum penganggaran yang berbasis lingkungan adalah sebagai berikut: 1) Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945, yang menetapkan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai HAM. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa Negara melalui Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengormati, melindungi dan mewujudkan atau memenuhinya. Dan anggaran berbasis lingkungan hidup (ABLH) atau lazim disebut juga Green Budgeting merupakan salah satu dari instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Selanjutnya pada tingkat perencanaan, isu tentang lingkungan telah menjadi salah satu isu yang dimasukkan menjadi permasalahan/isu penting dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD secara konsisten, namun kebijakan alokasi anggaran sering kurang mendapatkan perhatian yang lebih baik. Dengan demikian akan muncul rencana program/kegiatan yang berhubungan dengan upaya pelestarian lingkungan menjadi sangat minim sekali. Kedua, menyangkut

Konsep dan valuasi Anggaran Berbasis Lingkungan yang belum sepenuhnya disadari arti pentingnya oleh pemangku kepentingan utamanya para pengambil keputusan, yang seharusnya dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah sehingga mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Kebijakan anggaran berbasis lingkungan ditujukan sebagai salah satu instrument yang mendukung kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan secara nasional dan daerah di mana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari semua segi tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan pembangunan di masa depan. Tingkat kepedulian dan pemahaman para pemangku kepentingan tentang konsep keberlanjutan kemudian ditantang untuk memahami konsep dan mengimplementasikannya dalam pengambilan kebijakan politik anggaran. Bagi pemangku kebijakan daerah, anggaran berbasis lingkungan adalah suatu seni memilih dan memilah prioritas program daerah, mana program daerah yang akan diberikan porsi yang lebih serta mana program daerah yang akan dipinggirkan. Peran pendidikan sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk *pendidikan lingkungan*. Pada dasarnya, pendidikan lingkungan mencakup pengajaran kepada masyarakat tentang cara kerja alam dan bagaimana manusia dapat mengelola perilaku mereka untuk membantu melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem serta menjalani kehidupan yang berkelanjutan.

Isu lingkungan menjadi salah satu sasaran dalam Sustainable Development Goals (selanjutnya disingkat SDG's) yang mendesak untuk diselesaikan baik di Negara maju ataupun di Negara berkembang. Sejak pengelolaan lingkungan hidup berorientasi pada kepentingan ekonomi atau juga dapat dikatakan antroposentris, maka akan cenderung pada usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang eksploitatif terhadap lingkungan hidup. Untuk memenuhi kepentingannya, seringkali manusia cenderung melakukan "dosa-dosa" terhadap lingkungan hidup (environmental sins). Dari pengalaman, ketika masih dalam era millenium development goals (tujuan pembangunan millennium/selanjutnya disingkat MDG's) periode tahun 2005 sampai tahun 2015, Indonesia ternyata belum berhasil mengatasi permasalahan lingkungan. Selain karena tujuan MDG's yang sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja tanpa ada tujuan untuk mengatasi masalah ekologi dan lingkungan hidup, kondisi ini diperparah dengan tantangan dan ancaman besar lingkungan di Indonesia meliputi polusi lingkungan dan kerusakan lingkungan. Ketidakkampuan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kebakaran hutan di beberapa titik lokasi pulau Sumatera dan Kalimantan yang berujung pada bencana kabut asap di penghujung tahun 2015 adalah salah satu problematika lingkungan yang cukup menuai kecaman dunia internasional (Waluyo, 2021).

Penyusunan anggaran berbasis lingkungan (green budgeting) juga sangat dipengaruhi oleh faktor komitmen para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat di dalamnya. Komitmen tersebut, berkaitan erat dengan teori tentang kemauan politik (political will). Menurut Carmen Malena (2009: 21-23)

kemauan politik ini terbagi atas tiga faktor kunci penting yang mempengaruhinya, yakni : 1). keinginan politik (political want), yang pada level individu, keinginan politik dapat dilihat dari nilai-nilai personal dan prioritas diri; 2) kemampuan politik (political can), dilihat dari pengetahuan, keahlian, dan hak-hak personal; serta 3) keharusan politik (political must) dipengaruhi oleh kepekaan terhadap tugas-tugas yang diembannya (sense of duty) (Faqih, Hadi dan Purnaweni, 2017).

Menciptakan kondisi yang tepat Setelah organisasi sektor publik memutuskan ingin mengadopsi penganggaran ramah lingkungan, memastikan lingkungan yang tepat untuk penerapannya sangat penting untuk efektivitasnya. Konteks setiap organisasi sektor publik bersifat unik dan dibentuk oleh faktor politik, sejarah, dan hukum. Untuk mendapatkan peluang terbaik dalam menyukseskan penganggaran ramah lingkungan, kami telah mengidentifikasi tiga prinsip utama yang akan mendukung integrasinya antara lain sebagai berikut:

1. Keinginan politik. Agar penganggaran ramah lingkungan berhasil, kemauan politik, terutama sejak awal, merupakan faktor pendukung yang sangat penting. Meskipun proses ini sering kali diprakarsai oleh pejabat, mendapatkan dukungan dari pimpinan politik suatu organisasi atau pemerintah akan memastikan pendekatan ini lebih mungkin untuk diterapkan. Untuk mendapatkan dukungan politik, organisasi harus jelas mengenai motivasi mereka dalam memperkenalkan penganggaran ramah lingkungan. Faktor pendorong utama pendekatan ini harus diidentifikasi sejak dini. Hal ini akan memungkinkan pemilihan praktik yang tepat dan memungkinkan kepemimpinan politik untuk mendukung dan mendorong agenda penganggaran ramah lingkungan.
2. Membangun proses yang ada. Organisasi sektor publik menghadapi keterbatasan sumber daya, yang semakin meningkat sejak pandemi ini. Penganggaran ramah lingkungan tidak memerlukan sistem baru yang mahal atau dukungan eksternal yang ekstensif. Sebagian besar praktik penganggaran ramah lingkungan dapat memanfaatkan pengaturan yang sudah ada di organisasi. Mengingat pentingnya agenda perubahan iklim, kemajuan dalam reformasi penganggaran ramah lingkungan sangat dibutuhkan. Mengintegrasikan praktik ke dalam proses dan sistem anggaran yang ada akan mempercepat penerapan reformasi dan meminimalkan biaya dan gangguan. Seiring dengan berkembang dan berkembangnya pendekatan organisasi, teknik dan sistem dapat diadaptasi melalui proses yang berulang
3. Pendekatan sektor publik secara keseluruhan. Agar penganggaran ramah lingkungan menjadi efektif, maka harus diterapkan pada berbagai tingkat pemerintahan. Lebih dari separuh belanja publik untuk iklim dan lingkungan hidup berada di tingkat daerah (OECD, 2021) dan pemerintah daerah memelopori penerbitan obligasi ramah lingkungan (green bond). Semua organisasi sektor publik perlu mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mengadopsi penganggaran ramah lingkungan untuk memenuhi tujuan

perubahan iklim dan keberlanjutan mereka. Menerapkan penganggaran ramah lingkungan di setiap tingkat pemerintahan akan membantu mengembangkan pendekatan yang terkoordinasi, memungkinkan organisasi untuk berbagi praktik yang baik dan memberikan peluang untuk berinovasi. Seiring berkembangnya agenda pelaporan keberlanjutan sektor publik, organisasi dengan pendekatan penganggaran ramah lingkungan akan berada dalam posisi yang baik untuk merespons persyaratan pelaporan baru.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No.	Judul Artikel	Sumber (Nama Jurnal) dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan dan Hasil Penting
	Model Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan (Green Budgeting) Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Disertasi Analysis on the implementation of green budgeting in Central Java province Universitas Diponegoro Semarang (Faqih, Hadi dan Purnaweni, 2017).	<p>Tujuan umum: proses penyusunan anggaran pemerintah provinsi Jawa Tengah yang berbasis lingkungan hidup</p> <p>Tujuan spesifik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. komitmen pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan anggaran yang berbasis lingkungan hidup 2. menyusun model dalam penyusunan anggaran berbasis lingkungan hidup (green budgeting) 	<p>a. Komitmen stakeholder dalam penganggaran berbasis lingkungan juga rendah, disebabkan rendahnya pemahaman tentang anggaran berbasis lingkungan, serta inkonsistensi antara dokumen RPJMD dan APBD. Diajukan rekomendasi agar melibatkan komunitas pegiat lingkungan hidup dalam proses penyusunan anggaran. Untuk mewujudkan komitmen stakeholder dalam penganggaran berbasis lingkungan perlu dibentuk regulasi yang lebih teknis seperti PerDa dan PerGub mengenai keterlibatan komunitas lingkungan hidup dan didukung dengan sosialisasi yang memadai. Untuk memastikan anggaran lingkungan masuk dalam dokumen perencanaan, maka dibutuhkan model pernyataan anggaran berbasis lingkungan. Model berupa dokumen pernyataan anggaran hijau yang disusun oleh setiap organisasi perangkat daerah.</p> <p>Saran penelitian: Disarankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan model Penganggaran Komprehensif, Terfokus dan Partisipatif (CFPB). Komprehensif artinya tidak ada satupun teori atau aturan pengambilan keputusan yang dibiarkan</p>

				atau tidak dilakukan. Terfokus artinya sesuai dengan permasalahan yang diangkat atau diperhatikan tidak boleh diikuti dengan kebijakan anggaran yang tidak berkaitan, jika komitmennya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka anggaran tersebut tidak dibebani dengan pos anggaran lain yang tidak berkaitan. Partisipatif berarti seluruh elemen pemangku kepentingan, baik resmi maupun tidak resmi, terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan anggaran.
2.	<i>The Role of Green Budgeting on Environmental Quality on Indonesia Dyah</i>	Economics Development Analysis Journal (2023) (Nihayah dan Diastuti, 2023).	Pengaruh green budgeting, Human Development Index (HDI), Foreign Direct Investment (FDI), dan kepadatan penduduk terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia tahun 2011-2020.	Temuan menunjukkan bahwa green budgeting berpengaruh positif namun tidak signifikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif signifikan. Sebaliknya, Investasi Asing Langsung (FDI) dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas lingkungan di Indonesia.
3.	<i>Perancangan Implementasi Green Budgeting Pada PT. ABC Menuju Green Company</i>	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi (2023). (Coganuli dan Adhariani, 2023).	Memberikan kerangka terkait penerapan konsep green budgeting yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	a. Dalam pembuatan desain kerangka, PT. ABC telah mempunyai tujuan strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup yang diarahkan dari pemegang saham dan rencana jangka panjang perusahaan. Untuk mengimplementasikan konsep ini, perusahaan memiliki kebijakan terkait seperti Blueprint dokumen perusahaan hijau dan untuk melaporkan perkembangannya, perusahaan

			berdasarkan analisis studi kasus pada perusahaan manufaktur.	memiliki media seperti laporan manajemen dan laporan keberlanjutan untuk menginformasikan realisasi program. b. Saran penelitian: Jika konsep ini diterapkan, diperlukan mekanisme penandaan terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan anggaran tahunan perusahaan.
4.	<i>Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</i>	PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik (2022) (Hidayat, 2022).	Mengetahui apakah dengan adanya SDGs ini dapat membantu dalam kesejahteraan masyarakat.	Kesejahteraan di Indonesia masih menjadi persoalan, yang disebabkan karena kemiskinan tidak ada ujungnya meskipun berbagai solusi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah terlaksana tetapi dalam implementasinya masalah kemiskinan masih terjadi di Indonesia. Dalam mengukur kesejahteraan atau mengukur kualitas hidup tentunya akan melibatkan unsur kesehatan, pendidikan, aktivitas personal, dan hak-hak nya terpenuhi. Semua hal tersebut dapat dipenuhi dengan baik dan cepat apabila inspratruktur pembangunannya sudah baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Penelitian ini Sustainable Development Goals (SDGs) adalah suatu program mendunia jangka panjang guna meningkatkan sumber daya serta potensi yang ada pada setiap negara yang belum berjalan dengan optimal.
5.	Implementasi Green Budgeting Pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2461-0585 (2023) (Shinta dan Fidiana, 2023).	Mengkaji dan menganalisis implementasi green budgeting pada pemerintah daerah Kota Surabaya. Peneliti	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Surabaya menerapkan green budgeting dengan wujudu pengalokasikan anggaran untuk pembangunan lingkungan. Hal tersebut berdampak pada besaran realisasi anggaran yang digunakan oleh OPD yang terlibat dalam menjaga lingkungan berkelanjutan di Kota Surabaya yaitu yaitu (1) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau; (2) Dinas Lingkungan Hidup; (3)Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, cipta karya

				dan tata ruang; (4) Bencana dan perlindungan masyarakat; dan (5) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematasan. Terbukti
6.	Environmental-based budget planning in The Tegal Regency Government	E3S Web of Conferences 125 , 02005 (2019) ICENIS 2019 (Hidayattuloh, Bambang dan Amirudin, 2019).	Prioritas sektor dan kebijakan dalam penganggaran berbasis lingkungan hidup di Pemerintah Kabupaten Tegal.	Sektor persampahan merupakan sektor prioritas dan pengadaan truk sampah menjadi prioritas kebijakan dalam perencanaan anggaran berbasis lingkungan hidup di Pemerintah Kabupaten Tegal.
7.	Application of green budgeting in finance and development policy	IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (2022) (Hidayattuloh, Bambang dan Amirudin, 2019).	Penelitian ini berfokus pada hubungan antara green budgeting dengan kebijakan keuangan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana proporsi anggaran yang ditetapkan pada keuangan dan pembangunan	<p>a. Penganggaran hijau telah diterapkan di Indonesia, namun menghadapi berbagai permasalahan. Di tingkat daerah, pemerintah belum memahami penganggaran ramah lingkungan. Terdapat juga kekurangan data untuk merumuskan kebijakan penganggaran ramah lingkungan berikutnya. Kurangnya komitmen pemerintah menyebabkan anggaran pengelolaan lingkungan hidup tidak menjadi prioritas. Hal ini menyebabkan terbatasnya anggaran pemerintah daerah (APBD) yang dialokasikan.</p> <p>b. Keterbatasan anggaran harus diatasi dengan mencari sumber lain, misalnya menyiapkan program berkelanjutan atau pendekatan lingkungan.</p>
8.	<i>Green Budgeting Policy of Gresik Regency Government</i>	Proceedings of the 3rd International Conference on	Menggunakan anggaran publik untuk mencapai tujuan	a. Hasilnya, terdapat penjabaran arah kebijakan lingkungan hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini berdampak pada

		Social Sciences (ICSS 2020) Green (Kurniawan <i>et al.</i> , 2020).	lingkungan hidup.	penambahan jumlah kegiatan, keterlibatan aktor dan peningkatan anggaran lingkungan hidup pada tahun 2016 dan 2017. b. Indeks Kualitas Lingkungan juga meningkat. Namun, ada arah pembangunan lingkungan hidup yang tampaknya kurang mendapat perhatian.
9.	<i>Paris Collaborative on Green Budgeting OECD Green Budgeting Framework</i>	Oecd Green Budgeting Framework– Highlights (Hélène, 2019).	Paris Collaborative on Green Budgeting (PCGB) diselenggarakan oleh OECD dan berfungsi sebagai platform multidisiplin untuk penelitian dan analisis terfokus.	a. PCGB mengembangkan panduan konkrit dan praktis untuk membantu pemerintah di semua tingkat memasukkan pertimbangan tujuan iklim dan lingkungan ke dalam kerangka anggaran mereka dan mengidentifikasi prioritas dan kesenjangan penelitian untuk memajukan landasan analitis dan metodologis penganggaran ramah lingkungan. b. Kerangka anggaran modern memberikan lingkungan pendukung yang kuat bagi penganggaran ramah lingkungan. Hal ini mencakup kerangka anggaran yang menghubungkan perencanaan strategis dan penganggaran, cakupan anggaran multi-tahunan, hasil dan proses anggaran berbasis bukti, serta keterlibatan erat dengan parlemen dan masyarakat sipil. c. Penerapan Penganggaran Ramah Lingkungan juga didukung oleh kepemimpinan politik yang kuat, peran dan tanggung jawab pemerintah yang jelas, rangkaian implementasi yang dirancang dengan baik, sistem internal yang sesuai dengan tujuan, serta pengembangan kapasitas dan keahlian pegawai negeri sipil. Hal ini juga harus koheren dengan inisiatif anggaran lainnya, seperti penganggaran berkeadilan gender

10	Budgeting for environmental and sustainable development	OECD (2018), OECD Budget Practices and Procedures Survey. (Wilkinson, Benson dan Jordan, 2008)	Perubahan Iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) – dengan implikasi untuk memajukan respons kebijakan nasional. Untuk mendukung pemerintah. Pendekatan baru terhadap perencanaan dan persiapan anggaran, mendorong transparansi dan keterlibatan dengan warga negara serta mengadvokasi proses pemantauan dan evaluasi yang dapat mendukung pencapaian komitmen nasional dan internasional.	<p>a. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup di seluruh bidang kebijakan anggaran, mulai dari lingkungan hidup dan iklim hingga transportasi, kesehatan dan keuangan, akan mendukung penyelarasan insentif dan mengarah pada pendekatan berbasis lingkungan yang koheren dalam pembuatan kebijakan yang didukung oleh keputusan anggaran.</p> <p>b. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip ini mengasumsikan konservasi aset alam untuk pertumbuhan dan pembangunan di masa depan</p>
----	---	--	--	---

11	Implementasi Kebijakan Anggaran Menuju Good Governance	VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Guntoro, 2018)	Menganalisis implementasi kebijakan anggaran daerah dalam konteks tata pemerintahan yang baik.	Penganggaran harus dapat memotivasi ketiga domain untuk melakukan kemitraan dalam upaya memperkenalkan perubahan ekonomi regional agar efektif dalam menciptakan peluang kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, dan untuk beberapa hal mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat diwujudkan hanya dengan penganggaran berorientasi masyarakat sebagai fungsi utama penganggaran
12	Sustainable Local Development: An Overview of the State of Knowledge	Resources (Milán-García <i>et al.</i> , 2019)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tren terkini yang menjadi ciri konsep	Diperlukan mekanisme-mekanisme baru yang meringankan dan bahkan meniadakan gangguan ekonomi akibat globalisasi.
13	Paris Collaborative on Green Budgeting OECD Green Budgeting Framework Highlights	Oecd (OECD, 2021).	Mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan anggaran dan fiskal serta menilai koherensinya terhadap pelaksanaan komitmen nasional dan internasional dapat berkontribusi pertumbuhan berkelanjutan	Penerapan Penganggaran Ramah Lingkungan juga didukung oleh kepemimpinan politik yang kuat, peran dan tanggung jawab pemerintah yang jelas, rangkaian implementasi yang dirancang dengan baik, sistem internal yang sesuai dengan tujuan, serta pengembangan kapasitas dan keahlian pegawai negeri sipil. Hal ini juga harus koheren dengan inisiatif anggaran lainnya, seperti penganggaran berkeadilan gender
14	Local Government Budget Orientation: A Critique Of Budget Policy	Hasanuddin Economics and Business Review 06:1	Bertujuan untuk mengetahui orientasi anggaran dalam proses	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belunggu keselarasan komunikasi menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan kebijakan dengan mengedepankan rasionalitas untuk mendapatkan

		(2022) 1-9 (Mahdalena, Andry dan Haliah, 2022)	penyusunan dan penetapan anggaran pemerintah daerah. Penelitian tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Gorontalo.	legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan.
15	Teori dan Konsep Sistem Manajemen Lingkungan	OECD (2018), OECD Budget Practices and Procedures Survey. (Wilkinson, Benson dan Jordan, 2008)	Untuk mengetahui sistem manajemen lingkungan dan hubungannya dengan sumber daya alam serta pentingnya manajemen lingkungan yang berisi tentang sistem manajemen lingkungan dan pencemaran lingkungan	keterkaitan pencemaran dan manajemen lingkungan; komponen dalam sistem manajemen lingkungan; instrumen pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
16	Budgeting practices and procedures	Government at a Glance (Survey, Survey dan Budgeting, 2019)	Untuk mengetahui perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) – dengan	Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Desa Tlekung telah diimplementasikan dengan maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor - faktor yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan adalah banyak masyarakat yang pro dan kontra.

			implikasi untuk memajukan respons kebijakan nasional.	Faktor Pendukung tersedia sumber daya alam yang melimpah, sumberdaya manusia yang sudah mampuni di bidang pembangunan, kepastian hukum, tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat.
17	Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Tay dan Rusmiwari, 2019)	<p>a. Untuk mengetahui bentuk implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Desa Tlekung</p> <p>b. Faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan.</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kapasitas fiskal, jumlah industri, luas tutupan lahan, dan jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran dekonsentrasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anggaran dekonsentrasi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.
18	Effectiveness of Deconcentration Budget Policy toward Environmental Quality Improvement	JPSL Vol. 6 (2): 200-210, Desember 2016 Hidup (<i>et al.</i> , 2016)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian anggaran dekonsentrasi lingkungan hidup di provinsi dan	a. Hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan berkaitan dengan pembangunan yang ada di wilayah kawasan bandung utara, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Pertumbuhan yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bias bertambah

			menganalisis efektivitas anggaran dekonstruksi dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia.	sehingga menambah beban lingkungan hidup
19	Implementasi Kebijakan Pembangunan Di Kawasan Bandung Utara Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Jurnal Ilmu Administrasi (Afandi, 2014)	Regulasi tersebut merupakan sarana atau rambu-rambu dalam mengatur pemanfaatan lingkungan agar tetap memiliki fungsi daya dukung bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.	Lemahnya fungsi kelembagaan di daerah yang melakukan pengelolaan air limbah permukiman serta masih terbatasnya sumber pendanaan pemerintah untuk investasi maupun pengembangan pengolahan air limbah saat ini. Hal ini membuat upaya pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan masih berjalan ditempat
20	Kebijakan Dan Strategi Pengelolaanair Limbah Domestik Di Indonesia	Jurnal Rekayasa Lingkungan (Yudo dan Said, 2018).	Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi tentang kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik	Penganggaran hijau telah diterapkan di Indonesia, namun menghadapi berbagai permasalahan. Di tingkat daerah, pemerintah belum memahami penganggaran ramah lingkungan. Terdapat pula kekurangan data untuk merumuskan kebijakan penganggaran ramah lingkungan berikutnya. Kurangnya komitmen pemerintah menyebabkan anggaran pengelolaan lingkungan hidup tidak menjadi prioritas. Keterbatasan anggaran harus diatasi

			dalam rangka mendukung pengelolaan air limbah permukiman yang terpadu, efisien dan efektif dalam perencanaan, pembiayaan dan pembangunan serta pelaksanaannya	dengan mencari sumber lain, misalnya menyiapkan program berkelanjutan atau pendekatan lingkungan.
21	Environmental-based budget planning in The Tegal Regency Government		Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prioritas sektor dan kebijakan dalam penganggaran berbasis lingkungan hidup di Pemerintah Kabupaten Tegal.	hasil penelitian bahwa sektor persampahan merupakan sektor prioritas dan pengadaan truk sampah menjadi prioritas kebijakan dalam perencanaan anggaran berbasis lingkungan hidup di Pemerintah Kabupaten Tegal
22	Application of green budgeting in finance and development policy	OP Conference Series: Earth and Environmental Science (Azzahra,	Penelitian ini berfokus pada hubungan antara green budgeting dengan kebijakan keuangan dan pembangunan, hal	Penganggaran hijau telah diterapkan di Indonesia, namun menghadapi berbagai permasalahan. Di tingkat daerah, pemerintah belum memahami penganggaran ramah lingkungan. Terdapat pula kekurangan data untuk merumuskan kebijakan penganggaran ramah lingkungan berikutnya. Kurangnya komitmen pemerintah menyebabkan

		Pamungkas dan Trinarningsih, 2022)	ini bertujuan untuk melihat bagaimana proporsi anggaran yang ditetapkan pada keuangan dan pembangunan.	anggaran pengelolaan lingkungan hidup tidak menjadi prioritas. Keterbatasan anggaran harus diatasi dengan mencari sumber lain, misalnya menyiapkan program berkelanjutan atau pendekatan lingkungan.
23	Environmental Assessments within Green Budgeting	European Commission (Pojar, 2022)	Tujuan penelitian untuk menunjukkan bagaimana alat penganggaran ramah lingkungan lainnya, seperti kinerja dan dampak lingkungan indikator dan obligasi hijau negara, dapat membantu pembangunan metodologi penilaian lingkungan.	Membangun metodologi pengkajian lingkungan berdasarkan alat penganggaran ramah lingkungan yang sudah ada dapat mempermudah proses tersebut. Hal ini juga membantu memastikan konsistensi antara berbagai praktik dan definisi ramah lingkungan di tingkat nasional dan menghindari upaya duplikasi.
24	The climate dimension of fiscal policy sustainability: best practices in Green Budgeting and lessons for	Conselho das Financas Publicas (Marinheiro, Sousa dan Pinheiro,	Untuk mengetahui Penandaan Anggaran Ramah Lingkungan (Green Budget Tagging), yang	Penerapan Penganggaran Ramah Lingkungan (Green Budgeting) juga dapat membuka jalan bagi emisi Obligasi Hijau (Green Bonds) untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang terkait dengan lingkungan dan iklim. Obligasi semacam ini mungkin merupakan cara yang hemat biaya untuk membiayai

	Portugal Carlos	2022)	memungkinkan masyarakat menilai dampak kebijakan fiskal terhadap lingkungan dan iklim, baik dari sisi pajak maupun belanja anggaran negara.	kebutuhan investasi ramah lingkungan yang besar di negara yang memiliki banyak utang sekaligus berkontribusi terhadap penurunan risiko global.
25	The climate dimension of fiscal policy sustainability: best practices in Green Budgeting and lessons for Portugal Carlos	Journal of Environmental Management (Kao, Pan dan Lin, 2009).	untuk mencapai kelestarian lingkungan dan membantu pemerintah daerah dalam membuat alokasi anggaran yang tepat untuk meningkatkan Kelestarian Lingkungan Air Daerah (RWES) secara efisien.	hasilnya digunakan untuk menilai apakah anggaran yang tersedia dialokasikan dengan tepat untuk meningkatkan RWES. Penerapan sistem ini ditunjukkan melalui studi kasus yang melibatkan otoritas perlindungan lingkungan setempat
26	Budget 2022 A Review of Green Budgeting from a Tax Perspective	A Review of Green Budgeting from a Tax Perspective	Tujuan penganggaran ramah lingkungan yang digariskan oleh Dewan	Pertama, langkah-langkah perpajakan telah teridentifikasi, karena sebagian besar analisis penganggaran ramah lingkungan yang telah dilakukan hingga saat ini di Irlandia dan di seluruh UE dan OECD, berfokus pada pengeluaran. Kedua, kebijakan

		(Finance, 2022).	Penasihat Perubahan Iklim (CCAC), bertugas menilai dan memberikan saran terhadap transisi Irlandia menuju ekonomi ramah lingkungan yang berkelanjutan, juga dipertimbangkan.	ini menentukan kebijakan fiskal, dan bukan hanya kebijakan anggaran. Perbedaannya di sini adalah bahwa kebijakan anggaran dapat dianggap hanya berlaku terhadap perubahan anggaran yang baru dan bertahap, sedangkan kebijakan fiskal juga mencakup langkah-langkah yang sudah ada.
27	Green Budgeting: a Toolkit for Public Sector Finance Professionals	Association of Chartered Certified Accountants (ACCA, 2022)	Memahami penganggaran hijau dan mengidentifikasi empat motivasi utama bagi organisasi sektor publik untuk menganalisis anggaran pemerintah daerah saat ini untuk kegiatan iklim dan lingkungan hidup dan mengidentifikasi	Perubahan iklim telah memberikan dampak besar terhadap bumi, masyarakat, dan perekonomian global. Pemerintah berada di garis depan dalam menanggapi perubahan iklim; negara-negara telah menetapkan tujuan nasional dan membuat komitmen global untuk melindungi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

			potensi pendanaan yang tersedia untuk membiayai inisiatif iklim dan lingkungan pemerintah daerah.	
28	Climate and Environmental Financing at Regional Level: Amplifying and Seizing the Opportunities	LPEM-FEB UI Working Paper 067 Nauli A. Desdiani at.al (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk menangani penganggaran ramah lingkungan (green budgeting), yang merupakan alat penting dalam penganggaran ramah lingkungan penganggaran ramah lingkungan, dari aspek teoritis dan praktis.	Beberapa strategi untuk pemerintah daerah: (1) optimalisasi dan peningkatan kualitas belanja transfer fiskal antar pemerintah; (2) mengadopsi Penandaan Anggaran Iklim (CBT); (3) meningkatkan pendapatan asli daerah dari kegiatan berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup; (4) menghargai kabupaten dan/atau kota dengan nilai ekologi tinggi yang memiliki dukungan fiskal lebih besar melalui skema TAPE dan TAKE; (5) optimalisasi peran BUMN dan sektor swasta melalui CSR dan PPP; (6) optimalisasi pembiayaan multilateral; dan (7) memanfaatkan pembiayaan lain dari pusat pemerintah
29	Green Budgeting: France and Italy Practices	International Journal of Social, Political and Financial Researches	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya peran penganggaran	Anggaran ramah lingkungan yang ramah lingkungan hanya bisa berhasil jika diterapkan secara tegas oleh pemerintah pusat dan daerah. Perancis dan Italia, yang merupakan salah satu negara penting yang menerapkan penganggaran ramah lingkungan,

		(IJSPFR) (Kete, 2022)	dalam mewujudkan ekonomi hijau dan pertumbuhan ekonomi.	dibahas dalam penelitian ini. Hanya ada dua negara di Eropa yang telah mengeluarkan “pernyataan anggaran hijau” yang merupakan alat penting dalam penganggaran ramah lingkungan: Perancis dan Italia.
30	The role of budgeting in realizing a green economy and economic growth	IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Hidayati, Suyono dan Hartomo, 2022).	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya peran penganggaran dalam mewujudkan ekonomi hijau dan pertumbuhan ekonomi.	Langkah penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau bagi Indonesia adalah dengan membentuk konvensi mengenai visi yang ingin dicapai Indonesia pada tahun 2050 – sebuah visi yang terkait dengan strategi pertumbuhan ekonomi hijau yang komprehensif. Untuk mencapai visi ini diperlukan pemanfaatan strategi peluang pertumbuhan ramah lingkungan saat ini dan masa depan. Kewajiban melaksanakan penganggaran, jika ada, juga harus dilakukan di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan (Studi Kasus Pencapaian Local Sustainable Development Goal's di Kabupaten Mappi) yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: (1) Model kebijakan pengelolaan anggaran dengan tujuan perlindungan lingkungan pada era otonomi daerah ditengah kompleksitas persoalan dan isu lingkungan yang beragam. Pada model ini terdapat pemikiran/ide dan solusi yang ditawarkan terkait kebijakan daerah dengan segala proses dan dinamika pengelolaan anggaran yang dihadapi, (2) Pada tahapan selanjutnya para pemangku kebijakan mampu memberikan perhatian yang lebih serius dan fokus terhadap isu dan persoalan lingkungan yang selanjutnya ditransformasikan ke dalam kebijakan anggaran pada masing-masing daerah. Pada tataran ini diharapkan perlahan namun pasti persoalan lingkungan di setiap daerah dapat segera teratasi, sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan di mana aspek lingkungan perlu mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari setiap pemangku kebijakan di daerah. Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan memiliki pilar ekologi / lingkungan hidup, pilar sosial dan ekonomi.

Penelitian ini akan menfokuskan perhatian dan sekaligus sebagai kebaruan yang sifatnya Improvement novelty atau kebaruan yang bersifat pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu. Dari penelitian ini didapatkan kebaruan sebagai berikut: (1) pengintegrasian kepentingan lingkungan dan kebutuhan pembangunan melalui keterpaduan kebijakan pada proses perencanaan, dan manajemen kebijakan anggaran pada setiap tingkatan pemerintahan; (2) penyediaan seperangkat aturan yang jelas dengan perumusan kerangka hukum yang efektif; (3) memastikan bahwa kebijakan sektor ekonomi dan infrastruktur dapat efektif, sesuai dan sejalan dengan kepentingan lingkungan hidup; dan (4) membangun sistem akuntansi lingkungan dan pembangunan secara terpadu. Selanjutnya pada tahap implementasi kebijakan perencanaan, diharapkan isu lingkungan menjadi permasalahan/isu penting dan prioritas dalam perumusan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD secara konsisten berkelanjutan. Selain itu, diharapkan tulisan ini dapat menginspirasi pemangku kepentingan daerah untuk mulai merumuskan peraturan tentang perlindungan lingkungan hidup di masa depan, sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

1. 2. Rumusan Masalah

Dengan demikian, **rumusan masalah** pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penyusunan anggaran pemerintah Kabupaten Mappi yang berbasis lingkungan
- b. Sejauh mana komitmen pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan anggaran yang berbasis lingkungan
- c. Bagaimana menyusun strategi dalam penyusunan anggaran berbasis lingkungan (green budgeting)?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian tersebut, maka dapat diformulasikan ***tujuan penelitian*** sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis proses penyusunan anggaran pemerintah Kabupaten Mappi yang berbasis lingkungan.
- b. Untuk mengidentifikasi komitmen pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan anggaran yang berbasis lingkungan.
- c. Untuk mengevaluasi strategi dalam penyusunan anggaran berbasis lingkungan (green budgeting).

1. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada kajian berbagai sumber ilmiah dan perkembangan teori. Selain itu juga didukung dari laporan hasil penelitian (research) terkait konsep pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana menggabungkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan kualitas hidup generasi mendatang generasi sekarang dan mendatang. Kebijakan anggaran berbasis lingkungan ditujukan sebagai salah satu instrumen mendukung kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan secara nasional dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan/regulasi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini diupayakan dapat menghasilkan sintesis terhadap teori, hasil penelitian dan kondisi empiris, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Menjadi bagian dari pengembangan teori dan pengkayaan sumber ilmiah (ilmu pengetahuan) tentang konsep pembangunan berkelanjutan maupun model Kebijakan anggaran berbasis lingkungan ditujukan sebagai salah satu instrumen mendukung kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan secara lokal dan nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya preventif pencegahan bencana.
- b. Menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan terhadap regulasi atau kebijakan tentang Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan Menuju Pencapaian Local Sustainable Development .
- c. Menjadi preferensi bagi praktisi dan pengelola untuk dapat membangun model baru dan melakukan pengujian atas model kebijakan anggaran berbasis lingkungan menuju pencapaian local sustainable development dalam penelitian dan memberikan penilaian kualitas penerapan konsep anggaran berbasis lingkungan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan dielaborasi dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan/regulasi yang berlaku di Indonesia.

1. 5. Ruang Lingkup Penelitian

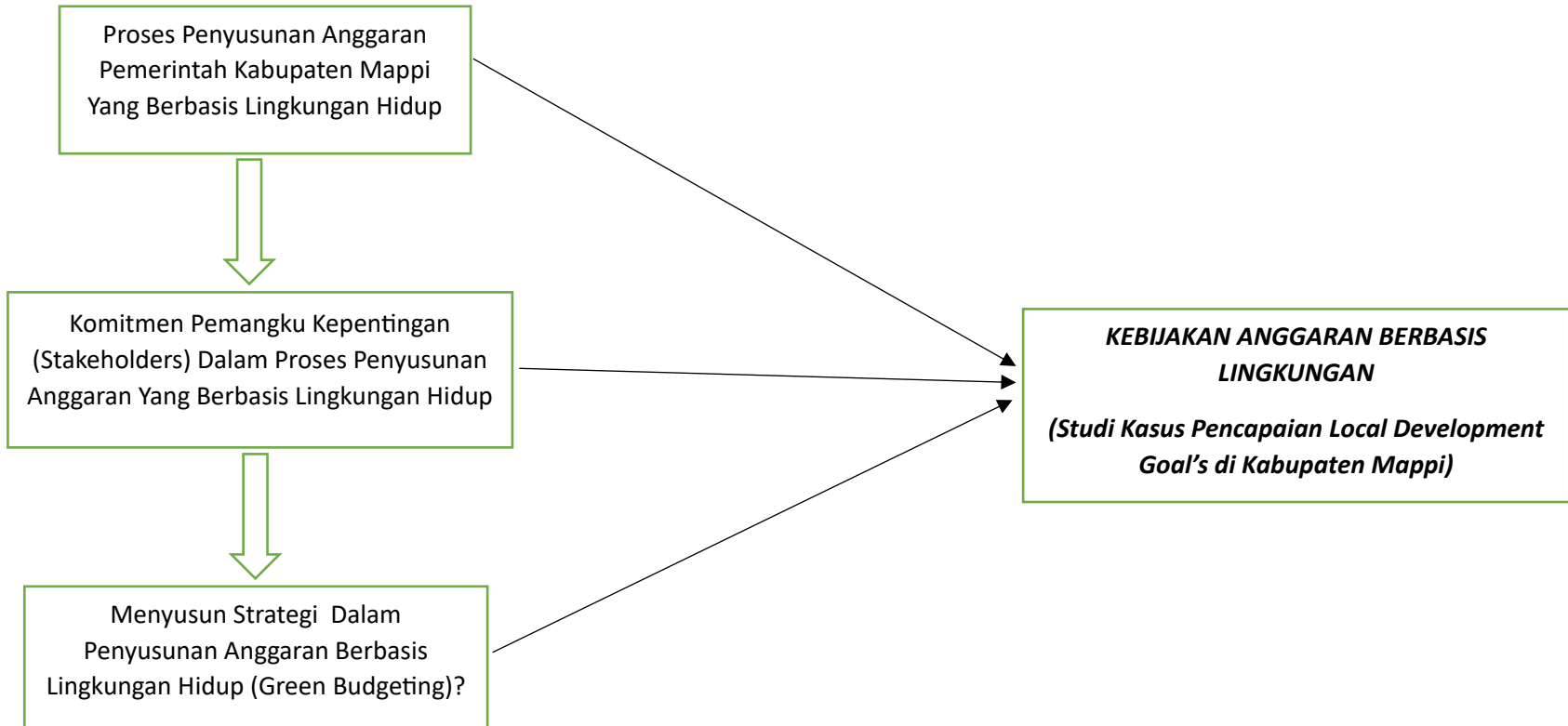
Ruang Lingkup Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Obyek penelitian, Proses penyusunan anggaran, dasar-dasar hukum kebijakan anggaran yang digunakan, para pemangku kebijakan anggaran serta anggaran pada APBD Kabupaten Mappi selama kurun waktu 2022 sampai dengan 2025.
2. Lingkup wilayah yang akan diteliti adalah wilayah administrasi Kabupaten Mappi. Kabupaten Mappi adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kapi, distrik Obaa.
3. Sumber data dan informasi dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kapasitas dalam penyusunan anggaran daerah di Kabupaten Mappi. Yang dimaksudkan dari anggaran daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan data awal observasi , penyusunan anggaran berwawasan lingkungan tidak semata mata pada retorika program kegiatan, tetapi pada Tindakan afirmatif terhadap kepentingan lingkungan , sehingga anggaran yang ada sekalipun untuk kegiatan pembangunan tetapi tetap memberikan porsi anggaran yang seimbang untuk kebutuhan lingkungan hidup demi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dengan semakin memburuknya keberlangsungan lingkungan hidup dan berdampak cukup keras pada Ekonomi dan Sosial, maka sudah waktunya kita mengevaluasi peraturan yang ada untuk menghadirkan Pembangunan Berkelanjutan yang terpadupadankan dengan model kebijakan anggaran berbasis lingkungan menuju pencapaian local sustainable development.

1. 6. Kerangka Pikir

- A. Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah Kabupaten Mappi Yang Berbasis Lingkungan Hidup
- Proses penyusunan perencanaan
 - Proses penyusunan anggaran
 - Aturan-aturan hukum sebagai pedoman penyusunan anggaran
 - Kapasitas akan lingkungan para pemangku kebijakan anggaran
 - Anggaran pada urusan lingkungan hidup
 - Hubungan antara anggaran sektor lingkungan hidup dengan SDG's di daerah
 - Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran sektor lingkungan hidup
 - Formulasi green budgeting berbasis otonomi daerah Sebagai upaya mewujudkan local sustainable development goals
- B. Komitmen Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Dalam Proses Penyusunan Anggaran Yang Berbasis Lingkungan Hidup
- Mendorong transparansi pengelolaan APBN/APBD utamanya yang berbasis lingkungan
 - Mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung program program kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup
 - Penguatan atribut hak-hak lingkungan hidup (environmental rights)
- C. Menyusun Strategi Dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup (Green Budgeting)?
- Potret kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di daerah
 - Desain dan mekanisme perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di daerah



Gambar 1. Kerangka Pikir

1. 7. Daftar Pustaka

- ACCA (2022) "Green Budgeting: a Toolkit for Public Sector Finance Professionals," *Association of Chartered Certified Accountants* [Preprint].
- Afandi, M.N. (2014) "Implementasi Kebijakan Pembangunan Di Kawasan Bandung Utara Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan," *Jurnal Ilmu Administrasi*, XI(2), hal. 225–244.
- Ansari, H. dan Tahir, M.I. (2023) *Green Public Procurement dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Tersedia pada: [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/988/1/BUKU - GREEN PUBLIC PROCUREMENT.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/988/1/BUKU_GREEN_PUBLIC_PROCUREMENT.pdf).
- Azzahra, L., Pamungkas, P. dan Trinarningsih, W. (2022) "Application of green budgeting in finance and development policy," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1114(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1114/1/012101>.
- Bappeda (2020) "Bab VI - STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMB DAERAH - Perubahan RPJMD 2018-2023 -," 5, hal. 1–54.
- Chabib, S. dan Rochmansjah, H. (2010) "Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah," *Bandung: Fokusmedia* [Preprint].
- Coganuli, H.T. dan Adhariani, D. (2023) "Perancangan Implementasi Green Budgeting Pada PT. ABC Menuju Green Company," *Owner*, 7(4), hal. 3255–3266. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1699>.
- Faqih, A.F., Hadi, S.P. dan Purnaweni, H. (2017) *Analysis on the implementation of green budgeting in Central Java province*, *Advanced Science Letters*. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1166/asl.2017.8708>.
- Fathurrahman, A. (2012) "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1), hal. 72–82.
- Finance, I.D. of (2022) "Budget 2022 A Review of Green Budgeting from a Tax Perspective."
- Guntoro, D. (2018) "Implementasi Kebijakan Anggaran Menuju Good Governance," *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 11(5), hal. 847–857. Tersedia pada: <https://doi.org/10.54783/jv.v11i%605.250>.
- Hardinandar, F. (2020) "Peran kebijakan fiskal terhadap trade-off antara ketimpangan dan kemiskinan di indonesia," *INOVASI*, 16(1), hal. 1–10.
- Hélène, L.-L. (2019) "Paris Collaborative on Green Budgeting--2nd Green Budgeting Experts Meeting."
- Hidayat, A. (2022) "Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 5(2), hal. 55–62. Tersedia pada: <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.624>.
- Hidayati, S.N., Suyono, J. dan Hartomo, D.D. (2022) "The role of budgeting in realizing a green economy and economic growth," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1114(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1114/1/012077>.
- Hidayattuloh, M.H., Bambang, A.N. dan Amirudin, A. (2019) "Environmental-based budget planning in the Tegal Regency Government," *E3S Web of Conferences*, 125(201 9), hal. 5–10. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912502005>.

- Holmes, J. dan Thomas, M. (2015) "Introducing the smart villages Concept," *The International Journal on Green Growth & Development*, 1(2), hal. 125–131.
- Kao, J.J., Pan, T.C. dan Lin, C.M. (2009) "An environmental sustainability based budget allocation system for regional water quality management," *Journal of Environmental Management*, 90(2), hal. 699–709. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.01.003>.
- Kete, H. (2022) "Green Budgeting: France and Italy Practices," *Uluslararası Sosyāl Siyasal ve Mali Arařtırmalar Dergisi*, 2(2), hal. 102–115.
- Kurniawan, B. et al. (2020) "Green budgeting policy of Gresik regency government," in *3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*. Atlantis Press, hal. 317–320.
- Mahdalena, Andry dan Haliah (2022) "Local Government Budget Orientation :," *Hasanuddin Economics and Business Review 06:1 (2022) 1-9*, 1(1), hal. 1–9. Tersedia pada: <https://doi.org/10.26487/hebr.v6i1i.3457>.
- Mardiasmo (2002) *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Mardiasmo, M.B.A. (2021) *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Marinheiro, C., Sousa, A. dan Pinheiro, A. (2022) "The Climate Dimension of Fiscal Policy Sustainability: Best Practices in Green Budgeting and Lessons for Portugal," *Conselho das Financas Publicas*, (01), hal. 1–24. Tersedia pada: <https://ideas.repec.org/p/alf/wpaper/2022-01.html>.
- Marlowe, J. (2015) "Local Government Fiscal Condition Before and After the Great Recession," *Local Government Budget Stabilization: Explorations and Evidence*, hal. 51–73.
- Milán-García, J. et al. (2019) "Sustainable local development: An overview of the state of knowledge," *Resources*, 8(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.3390/resources8010031>.
- Nihayah, D.M. dan Diastuti, R. (2023) "The Role of Green Budgeting on Environmental Quality on Indonesia," *Economics Development Analysis Journal*, 12(2), hal. 217–230. Tersedia pada: <https://doi.org/10.15294/edaj.v12i2.68929>.
- OECD (2021) "Green Budgeting Framework: Highlights," *Oecd* [Preprint]. Tersedia pada: www.oecd.org/environment/green-budgeting/.
- Pojar, S. (2022) "Environmental Assessments within Green Budgeting," *European Commission*, 8022(December). Tersedia pada: <https://doi.org/10.2765/745591>.
- Prof. Dr. H.M. Sidik Priadana, MS Denok Sunarsi, S.Pd., M.M.Ch. (2021) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books.
- Ritonga, I.T. (2014) "Modelling Local Government Financial," *Modelling Local Government Financial Conditions in Indonesia* [Preprint].
- Rofifah, D. (2020) "Kebijakan Pengelolaan Anggaran Dana Otonomi Khusus," *Unimal Press*, hal. 12–26.
- ROSLIANA, R., ZULFHI SURYA, R. dan ADJIE, G. (2021) "Analisa Kebijakan Anggaran Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Operasional Pertambangan Emas Skala Kecil (Pesk) Di Kabupaten Xyz," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), hal. 7–11. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32520/jak.v10i1.1650>.
- Saaty, T.L. (1993) "Pengambilan keputusan bagi para pemimpin," *PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta* [Preprint].
- Sabatier, P.A. (1986) "Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation

- Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis,” *Journal of Public Policy*, 6(1), hal. 21–48. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1017/S0143814X00003846>.
- Shinta, T.D. dan Fidiana (2023) “Implementasi Green Budgeting Pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(8), hal. 1–17.
- Sugiono (2008) “Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,” CV. Alfabeta, Bandung, 25.
- Survey, P., Survey, B. dan Budgeting, C. (2019) “Budgeting practices and procedures,” *Government at a Glance*, hal. 114–116. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1787/g211e6d7b7-en>.
- Taufiqurrahman, M.A. dan Widajantie, T.D. (2022) “Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran pada badan daerah Kabupaten Bojonegoro,” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), hal. 4648–4658.
- Tay, D.S.R. dan Rusmiwari, S. (2019) “Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan,” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4), hal. 217–222.
- Utomo, S.W., Sulistyowati, L. dan Yulianto, G. (2015) “Teori dan Konsep Sistem Manajemen Lingkungan,” *Modul 1*, hal. 1–39. Tersedia pada: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSLK5202-M1.pdf>.
- Wahab, A. (2001) “Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, PT,” *Bumi Aksara, Jakarta Anonim, Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman (UU No. 4 Tahun 1992), Djambatan, Jakarta* [Preprint].
- Waluyo (2021) *Green Budgeting: Konsep Anggaran Keuangan Daerah Berbasis Isu Lingkungan Hidup Menuju Local Sustainable Goals*.
- Wilkinson, D., Benson, D. dan Jordan, A. (2008) “Green budgeting,” in *Innovation in environmental policy? Integrating the environment for sustainability*. Edward Elgar Cheltenham, hal. 70–92.
- Yudo, S. dan Said, N.I. (2018) “Kebijakan Dan Strategi Pengelolaanair Limbah Domestik Di Indonesia,” *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 10(2), hal. 58–75. Tersedia pada: <https://doi.org/10.29122/jrl.v10i2.2847>.
- et al.* (2016) “Effectiveness of Deconcentration Budget Policy toward Environmental Quality Improvement,” *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 6(2), hal. 200–210. Tersedia pada: <https://doi.org/10.19081/jpsl.2016.6.2.200>.

BAB II TOPIK PENELITIAN I PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI YANG BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP

2. 1. Latar Belakang

Anggaran negara atau anggaran daerah merupakan bentuk investasi negara untuk pembangunan di semua bidang kehidupan rakyatnya dimana diharapkan kegiatannya tidak merusak lingkungan, tetapi melestarikan lingkungan. Pemerintah pusat dan daerah juga bisa memanfaatkan anggaran yang berbasis lingkungan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal (Nihayah & Diastuti, 2023). Sayangnya, angka yang tercantum di lokal anggaran pemerintah kadang-kadang ditafsirkan berbeda dan mempunyai arti yang berbeda. Hampir tidak ada ruang publik di dalamnya proses penganggaran dan cenderung dilakukan secara formal hanya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai akibat, proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran lebih banyak digunakan sebagai strategi politik (Mahdalena, Andry dan Haliah, 2022).

Para profesional di bidang keuangan harus menjadi pusat pendekatan penganggaran ramah lingkungan di organisasi sektor publik. Keterampilan akuntan profesional dan peran yang mereka jalankan di sektor publik membekali mereka untuk mendukung organisasi dalam lima langkah utama penerapan penganggaran ramah lingkungan. Langkah-langkah ini juga menyoroti dua praktik yang paling banyak digunakan, pertama, penandaan anggaran ramah lingkungan dan, kedua, pendekatan evaluasi, seperti penilaian dampak lingkungan dan analisis biaya-manfaat lingkungan.

Penganggaran ramah lingkungan (green budgeting) menawarkan berbagai metode untuk mengintegrasikan pertimbangan perubahan iklim dan lingkungan hidup ke dalam proses penganggaran inti organisasi sektor publik. Saat memulai perjalanan penganggaran ramah lingkungan, organisasi harus memiliki tujuan utama yang jelas dan mengadopsi pendekatan yang paling tepat. Apapun alasan spesifik suatu organisasi untuk mengadopsi penganggaran ramah lingkungan, kondisi yang tepat diperlukan agar hal tersebut berhasil. Sejak awal, para pemimpin politik perlu memahami dan mendukung pendekatan organisasi terhadap penganggaran ramah lingkungan. Metode yang digunakan harus didasarkan pada proses anggaran yang ada dan, jika memungkinkan, seluruh sektor publik di suatu negara harus mulai menerapkan penganggaran ramah lingkungan.

Implementasi penganggaran ramah lingkungan yang efektif memerlukan lima langkah, yang dibangun berdasarkan proses siklus anggaran yang ada. Para profesional di bidang keuangan berperan penting dalam setiap langkah dalam mengembangkan, menerapkan, dan mempertahankan pendekatan penganggaran ramah lingkungan. Akuntan profesional di jantung penganggaran ramah lingkungan akan memungkinkan organisasi sektor publik mengubah tujuan dan ambisi menjadi rencana yang dihitung biayanya untuk pendanaan dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan. Para profesional keuangan memahami kendala sumber daya yang umumnya dihadapi sektor publik dan terbiasa bekerja sama dengan manajer senior

dan, jika relevan, pejabat terpilih untuk memastikan prioritas tercermin dalam anggaran.

Penganggaran ramah lingkungan tidak akan menyelesaikan krisis iklim dengan sendirinya, namun dengan memberikan kerangka kerja bagi organisasi sektor publik untuk menerapkan tujuan perubahan iklim dan lingkungan hidup mereka, hal ini dapat menyoroti permasalahan yang ada dan menyediakan pendekatan terpadu.



Gambar 2. Lima Langkah Kunci Penerapan Penganggaran Ramah Lingkungan

1. Mengidentifikasi sejauh mana belanja sejalan dengan kebijakan dan prioritas pemerintah saat ini dalam agenda ini akan memberikan dasar bukti dan dasar belanja untuk menginformasikan keputusan belanja di masa depan.
2. Memprioritaskan pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak terbesar terhadap tujuan perubahan iklim dan lingkungan hidup organisasi sangatlah penting, mengingat sumber daya sektor publik pada umumnya terbatas. Hal ini melibatkan pendekatan yang konsisten dalam mengevaluasi usulan belanja baru dan menyelaraskan anggaran dengan prioritas dan komitmen yang telah dibuat oleh organisasi. Menyatukan keahlian seluruh staf organisasi untuk mendukung penilaian ini sangatlah penting. Meskipun sumber daya dan kemampuan berbeda antar organisasi, organisasi ini dapat mencakup spesialis lingkungan hidup dan perubahan iklim, ekonom, dan mereka yang terlibat dalam pemberian layanan, serta fungsi keuangan.
3. Pembelanjaan yang direncanakan harus dikategorikan ke dalam sistem anggaran, untuk menangkap tujuan yang dimaksudkan sedetail mungkin. Sistem anggaran yang efektif dapat mendukung produksi data akuntansi dan statistik yang komprehensif mengenai belanja ramah lingkungan. Informasi yang akurat akan sangat penting untuk pelaporan penggunaan dana obligasi ramah lingkungan, serta hibah yang diterima organisasi sektor publik untuk tujuan lingkungan tertentu.
4. Untuk menjamin kredibilitas anggaran, mekanisme pengawasan eksternal harus ada. Umumnya, organisasi sektor publik tunduk pada audit eksternal. Beberapa negara juga telah membentuk badan-badan, yang independen dari struktur utama

pemerintahan, untuk bertindak sebagai 'anjing pengawas' lingkungan hidup atau iklim. Jumlah negara yang memiliki lembaga atau dewan fiskal independen juga semakin meningkat. Semua struktur ini mempunyai peran penting dalam penganggaran ramah lingkungan.

5. Penganggaran ramah lingkungan merupakan pendekatan yang berulang dan adaptif; hal ini dapat dibangun melalui putaran anggaran berturut-turut seiring dengan berkembangnya kapasitas dan peningkatan sistem. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat diperkuat dengan mengembangkan metodologi untuk menilai dampak pengeluaran ketika dampak lingkungan lebih sulit diidentifikasi atau dengan memasukkan dampak dari upaya peningkatan pendapatan.

Anggaran keuangan pemerintah daerah adalah rencana target pendapatan dan belanja yang akan dicapai dalam satu periode (Fathurrahman, 2012). Anggaran ini mengambil peranan penting dalam menjaga jalannya pemerintahan untuk menjalankan pelayanan publik. Program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan sejalan dengan kapasitas keuangan yang dimiliki. Setelah itu, kapasitas keuangan memberikan koridor pada batasan pengeluaran belanja yang dapat dilakukan. Anggaran keuangan pemerintah daerah merupakan sarana koordinasi manajemen antarbagian dalam pemerintahan (Taufiqurrahman dan Widajantie, 2022). Anggaran ini juga menjadi dokumen politik yang membuktikan adanya komitmen antara eksekutif dan legislatif atas penggunaan keuangan publik. Anggaran keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan prioritas dalam menentukan tingkat layanan publik kepada masyarakat (Wadma, Hubungan Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan, 2016). Dalam proses monitoring, anggaran mencerminkan kondisi keuangan dan proses pelaksanaan operasional pemerintah daerah.

Anggaran keuangan pemerintah daerah menginformasikan segala aktivitas dan penggunaan dana organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (Hardinandar, 2020). Seluruh pengeluaran pendapatan dan belanja akan dilaporkan kepada publik baik rencana maupun realisasi. Anggaran keuangan pemerintah daerah menunjukkan kondisi keuangan dari pemerintah daerah mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan keuangan. Dalam operasional, anggaran keuangan pemerintah daerah harus memiliki strategi yang baik dalam mengontrol sumber daya yang dimiliki. Kontrol sumber daya ini bertujuan untuk optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas pengeluaran belanja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Ritonga, 2014).

Anggaran keuangan pemerintah daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Alat Perencanaan. Perumusan tujuan dan sasaran kebijakan adalah salah satu fungsi anggaran keuangan pemerintah. Rumusan tujuan dan sasaran kebijakan ini mengatur satuan kerja dibawah pemerintah daerah dalam merundi biaya program dan kebijakan. Disamping itu, hal ini juga merencanakan sumber pendapatan dan nilainya yang akan diperoleh pemerintah daerah.
- b. Alat Kebijakan Fiskal. Anggaran keuangan pemerintah daerah dapat digunakan

untuk mengelola kebijakan fiskal. Melalui anggaran keuangan pemerintah daerah, kebijakan fiskal akan mempermudah pemerintah daerah dan satuan kerjanya untuk memprediksi dan mengestimasi intervensi ekonomi dan layanan publik.

- c. Alat Pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian kinerja pemerintah. Mekanisme persetujuan legislatif dan musyawarah perencanaan pembangunan menjadi prosedur dalam anggaran keuangan pemerintah daerah melakukan pengendalian terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah daerah
- d. Alat Penilaian Kerja Penilaian kerja pemerintah daerah dapat ditunjukkan dengan tata kelola anggaran keuangan. Penilaian kinerja pemerintah daerah dinilai berdasarkan pencapaian serapan, efisiensi dan dampak pelaksanaan anggaran
- e. Alat Motivasi. Anggaran digunakan sebagai motivasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam optimisme pembangunan ekonomi daerah. Dengan membuat anggaran yang tepat, pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kebijakan sesuai target dan tujuan pembangunan daerah, sehingga manajemen dapat dijalankan dengan kinerja yang baik
- f. Alat Politik Anggaran keuangan pemerintah merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Secara politik, anggaran keuangan dapat menjadi alat politik bagi legislatif (sebagai representasi masyarakat) untuk mendukung dan mengoreksi penggunaan dana publik oleh pemerintah daerah
- g. Alat Menciptakan Ruang Publik . Anggaran keuangan pemerintah daerah diusulkan dan disusun oleh beberapa pihak. Para pihak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penganggaran keuangan publik. Proses penganggaran inilah yang mampu menciptakan ruang publik, bahwa keuangan pemerintah disusun dan diawasi .
- h. Alat Koordinasi dan Komunikasi bersama-sama. Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar satuan kerja maupun dengan satuan organisasi diluar pemerintah daerah. Komunikasi dan koordinasi ini dilakukan dalam setiap tahap perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu memetakan dan mengatur koordinasi agar kinerja seluruh satuan kerja bekerja efektif dan efisien

Kondisi keuangan pemerintah daerah mengukur kesehatan keuangan pemerintah daerah dalam beberapa aspek antara lain aspek keberlanjutan, kerentanan dan fleksibilitas. Hal ini dilakukan dalam konteks keseluruhan lingkungan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah. Keberlanjutan atau kesinambungan keuangan pemerintah daerah adalah kondisi pemerintah daerah untuk mampu mempertahankan program yang sudah direncanakan. Disamping itu, anggaran keuangan pemerintah daerah tersebut harus mampu memenuhi beban utang yang terjadi sebelumnya.

Dalam rangka mewujudkan visi **Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan yang di rincikan lagi dalam visi Otonomi khusus Papua yaitu Papua Pintar, Papua Sehat dan Papua produktif**, maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis,

memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua. Sumberdaya alam Tanah Papua yang berlimpah harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Sumberdaya yang dapat diperbaharui dikelola dengan memperhatikan kelangsungan fungsi-fungsi ekologis sehingga tetap lestari dan produktif, sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dikelola secara baik dan lebih profesional serta diharapkan mampu menunjang usaha peningkatan perekonomian, menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan program pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada kekhawatiran dari pemangku kebijakan bahwa akan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya yang dikarenakan ketergantungan akan dana transfer pemerintah pusat dalam rangka membiayai program program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari postur keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi Pendapatan Asli Daerah mempunyai sumbangan terhadap prosentase pendapatan daerah sangat kecil bila di bandingkan dengan transfer pemerintah pusat. Kondisi demikian dialami oleh lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki kemampuan dalam mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.

Menurut Kuncoro (1995: 334-358), Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat memberikan manfaat agar tiap-tiap daerah bisa membiayai kehidupan daerahnya dengan perolehan hasil daerah baik berupa retribusi, pajak pendapatan, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain. Atas dasar pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keseluruhan daerah sebagai suatu kesatuan wilayah kehidupan maupun kehidupan setiap individu anggota masyarakat karena pelaksanaan pembangunan nasional berada didaerah, maka rencana pembangunan daerah merupakan bagian dari kerangka umum pola pembangunan nasional dan daerah haruslah saling menunjang.

Bagi pemerintah daerah yang mempunyai Pendapatan asli Daerah cukup tinggi prosentasenya bila dibandingkan dengan transfer pemerintah pusat, maka daerah tersebut akan memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan anggarannya untuk membiayai program-program dan urusan wajibnya. Urusan Lingkungan merupakan salah satu urusan wajib yang didesentralisasikan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian bagi daerah-daerah surplus pendapatan asli daerahnya, akan lebih leluasa mengalokasikan anggaran yang

berkaitan dengan urusan lingkungan hidup, walaupun masih ada factor penentu lainnya yaitu factor pengetahuan dan pemahaman serta keberpihakan para pemangku kebijakan anggaran terhadap alokasi anggaran berbasis lingkungan.

Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan yang merupakan daerah studi kasus dalam penelitian ini, mempunyai sumbangan Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kabupaten Mappi dengan prosentase di bawah 10 persen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi selama kurun waktu berdirinya kabupaten Mappi tahun 2003, prosentase PAD terhadap APBD selalu di bawah 10 proses yaitu pada kisaran 3-8 persen. Kondisi anggaran yang demikian ini sangat mempengaruhi kebijakan anggarannya, apalagi sebagai daerah otonom yang masih muda, dipastikan mempunyai kebutuhan akan pembangunan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur yang tinggi. Alokasi anggaran yang dianggarkan untuk urusan lingkungan hidup juga sangat minim, sehingga keberlanjutan kelestarian lingkungan terancam yang disebabkan eksploitasi sumber daya alam di kabupaten Mappi dilakukan secara terus menerus tanpa upaya mengembalikan kelestarian lingkungan.

Tingkat Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum atau terus menerus. Kenaikan harga meliputi semua barang dan proses kenaikan secara berkesinambungan. Kenaikan harga berlangsung cukup lama dan terus menerus. Inflasi juga dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga-harga naik Selain itu distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi.



Gambar 3. Pendekatan Pembangunan Daerah Papua

Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Papua tahun 2018-2023 terdiri dari Arah Kebijakan Umum Pembangunan yang mencakup bidang-bidang pembangunan antara lain pembangunan yang mencapai target Papua Pintar, Papua sehat dan Papua

produktif dengan cara pembangunan yang diarahkan pada Pembangunan Kewilayahan. Pembangunan kewilayahan artinya bahwa pembangunan diarahkan untuk membuka sentra sentra permukiman pedalaman yang masih bernuansa local, alam dan budaya local. Target pembangunan kewilayahan ini pasti akan berdampak pada rusaknya lingkungan, berkurangnya daya dukung lingkungan serta berkurangnya makhluk hidup biotik dan abiotic di area pembangunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan akan menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan fokus prioritas dan waktu pelaksanaan, sedangkan Arah pembangunan kewilayahan akan menjelaskan arah dan strategi pembagunan kewilayahan berbasis lingkungan (Bappeda, 2020).

Pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah teritorial dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan umum atas prakarsa sendiri berdasarkan pendapat rakyat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32/2004). Ada dua tingkat pemerintahan daerah di Indonesia: pemerintah daerah provinsi; dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pada tingkat pemerintah daerah kabupaten dan kota. Kondisi keuangan pemerintah daerah mengacu pada kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya (kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kewajiban operasional dan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat), mengantisipasi kejadian yang tidak terduga dan melaksanakan hak keuangan. secara efisien dan efektif.

Menurut Berne dan Schramm (1986) dalam (Marlowe, 2015) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kemungkinan pemerintah daerah memenuhi kewajiban keuangannya kepada pemangku kepentingan ketika kewajiban tersebut sudah jatuh tempo. Kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai pelayanannya secara berkelanjutan. Mereka membedakan antara solvabilitas tunai, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas tingkat layanan. Solvabilitas tunai adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan cukup uang tunai dalam waktu satu bulan sampai tiga bulan untuk melunasi kewajibannya. Solvabilitas anggaran mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan yang memadai untuk membiayai standar pelayanan yang ada atau yang diinginkan. Solvabilitas jangka panjang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kegiatan belanjanya, termasuk belanja rutin dan belanja lainnya yang hanya terjadi pada saat harus diselesaikan. Menurut Wang dkk. (2007) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai derajat solvabilitas keuangan pemerintah daerah, yang terdiri dari faktor solvabilitas tunai, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas tingkat layanan .

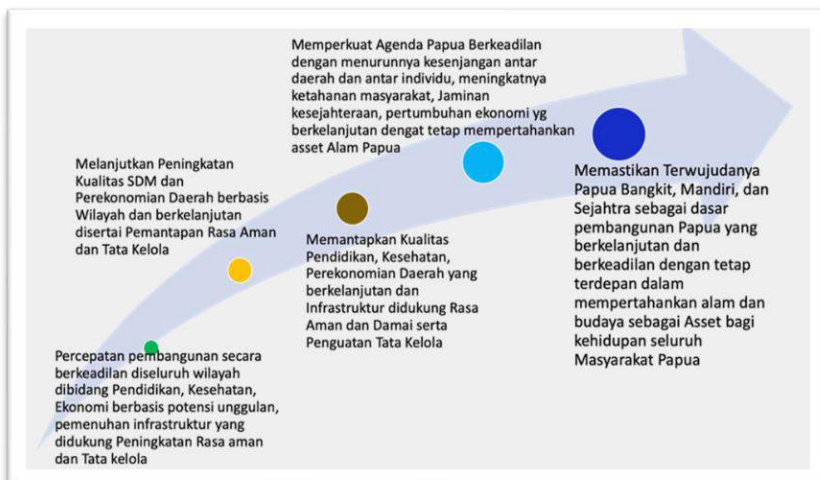
Konsep green budgeting dalam pembangunan daerah dapat diasumsikan dengan local anggaran berbasis lingkungan pemerintah yang dalam strukturnya memuat komponen pendapatan dan belanja daerah. Anggaran berbasis lingkungann hadir sebagai sebuah konsep yang melengkapi program CSR (Corporate Social) perusahaan Tanggung jawab). Penganggaran ramah lingkungan menggabungkan

tujuan lingkungan dengan proses penganggaran perusahaan. Tujuan utama penganggaran lingkungan adalah untuk memastikan perusahaan dapat memberikan perhatian yang cukup terhadap isu-isu lingkungan dalam membuat kebijakannya.

Memasukkan aspek anggaran dalam penganggaran bukan hanya berarti mengalokasikan prosentase anggaran untuk membiayai kebutuhan lingkungan, tetapi dengan menerapkan prinsip hijau dalam berbagai aspek baik dari sisi penerimaan maupun dari pengeluaran. Sebagai contoh pada saat akan mengambil kebijakan anggaran sector energi, para pemangku kebijakan diharapkan lebih memilih untuk membangun pembangkit listrik dengan energi terbarukan apabila dibandingkan dengan program subsidi listrik. Contoh lainnya pemangku kebijakan hendaknya lebih memilih pembangunan dan pengembangan transportasi massal apabila dibandingkan dengan pembangunan jalan tol.

Prioritas anggaran program pengelolaan lingkungan hidup harus memenuhi infrastruktur lainnya program agar kota tidak mengalami penurunan kualitas lingkungan. Untuk itu diperlukan dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah, senator, dan masyarakat. Arah pembangunan lingkungan hidup biasanya dituangkan dalam rencana pembangunan. Rencana pembangunan yang baik harus mencakup beberapa hal: sebagai berikut:

- a. Pembangunan industri yang didukung lingkungan hidup.
- b. Konservasi sumber daya air.
- c. Pembangunan permukiman yang memperhatikan fungsi lingkungan hidup.
- d. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan.
- e. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.
- f. Meningkatkan pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan.



Gambar 4. Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian terkait kebijakan anggaran daerah berbasis lingkungan khusus di Kabupaten Mappi.

Pentahapan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus dalam setiap tahun selama lima tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim, sektor publik harus menerapkan penganggaran ramah lingkungan. Semakin banyak organisasi sektor publik yang mengembangkan rencana penyampaian bantuan untuk memenuhi target iklim dan lingkungan mereka. Meski begitu, sering kali strategi-strategi tersebut tidak memiliki elemen penting: rencana yang didanai dengan tindakan rinci yang bertujuan untuk mencapai ambisi tersebut. Pendekatan penganggaran ramah lingkungan diadopsi oleh berbagai jenis organisasi sektor publik di seluruh dunia. Walaupun organisasi-organisasi di masing-masing contoh ini mempunyai tujuan keseluruhan yang sama dalam mengurangi emisi, masing-masing organisasi mempunyai alasan spesifik tersendiri dalam mengadopsi pendekatan tertentu terhadap penganggaran ramah lingkungan.

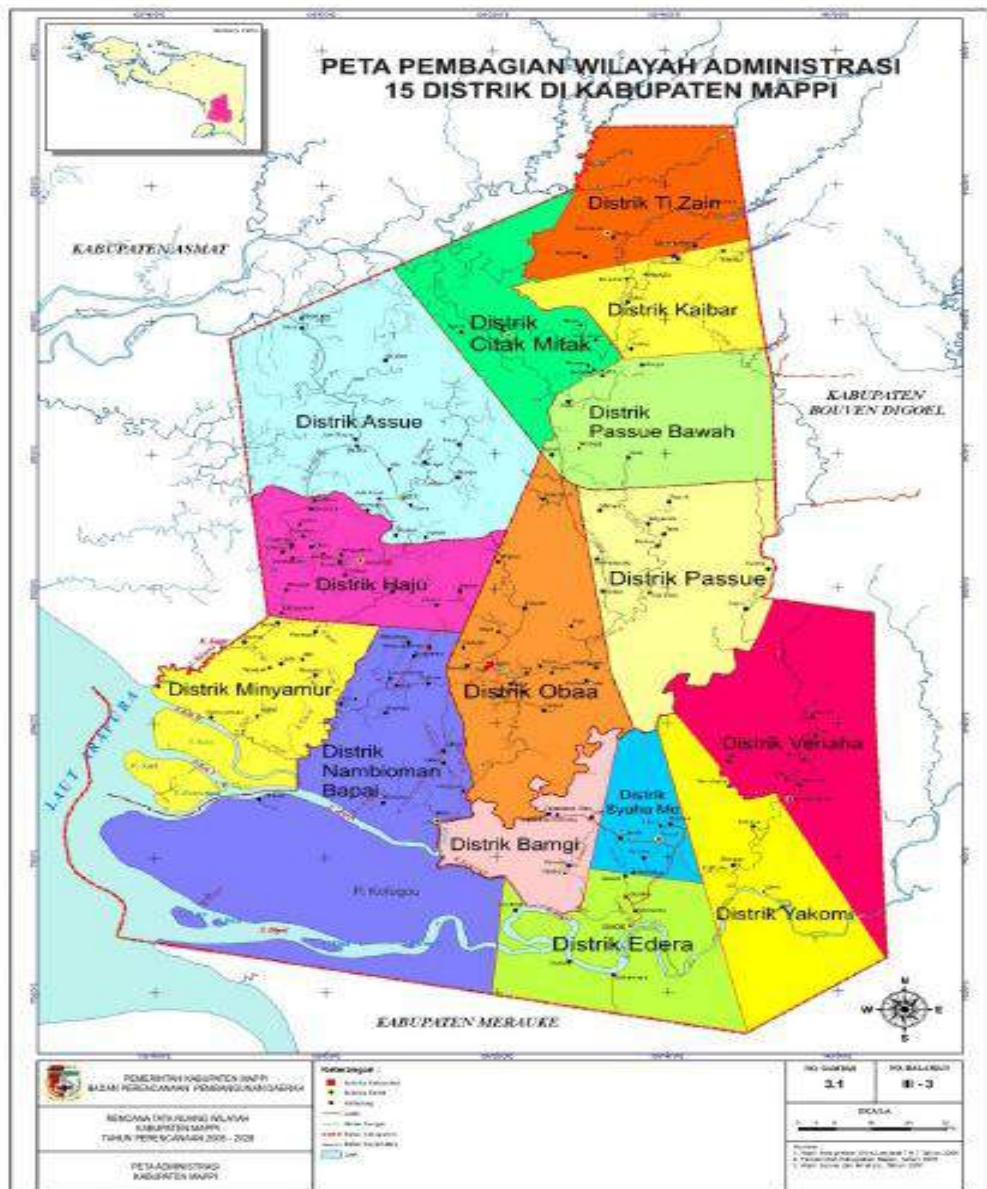
'Visi 2030' pemerintah Kenya adalah menjadi negara industri dan berpendapatan menengah yang berdaya saing global pada tahun 2030. Saat ini, perekonomian Kenya sangat bergantung pada sumber daya alam dan rentan terhadap perubahan iklim. Secara khusus, perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan besarnya kejadian cuaca ekstrem di negara ini. Kenya kini menerapkan bentuk penandaan hijau (green tagging) dengan memperkenalkan segmen baru dalam bagan akun untuk memberi kode dan melacak pengeluaran terkait perubahan iklim, menggunakan kode empat digit. Dua digit pertama mengacu pada subjek penandaan (misalnya perubahan iklim), digit ketiga menunjukkan fokus (adaptasi, mitigasi, atau keduanya), dan digit keempat mengklasifikasikan apakah tujuan pengeluaran ditujukan untuk perubahan iklim, (yaitu pokok, signifikan, atau tidak tepat sasaran). Hanya item anggaran yang lebih dari 25% dari jumlah tersebut dialokasikan untuk kegiatan terkait perubahan iklim yang dianggap relevan dan diberi tag.

2. 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan membantu peneliti dalam memahami konteks, kerangka teoritis, serta data-data yang relevan untuk mendukung argumentasi dan temuan dalam penelitian.

2.2.1. Waktu dan Lokasi

Penelitian Kebijakan Anggaran Daerah Berbasis Lingkungan akan di laksanakan pada bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan 2025 lokasi sebagai berikut:



Gambar 5. Peta Kabupaten Mappi

2.2.2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data sekunder, data sekunder yang digunakan adalah data yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain, seperti data statistik, laporan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan anggaran daerah berbasis lingkungan. Data sekunder yang diambil pada penelitian ini yaitu Organisasi Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung dengan proses pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan, Badan Pusat Statistik, Studi Literatur, Buku dan Jurnal yang bereputasi internasional.

Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; 1). wawancara, 2). observasi, 3). dokumentasi, dan 4). diskusi terfokus (Focus Group Discussion). Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus keduanya dilakukan, dst. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh.

Tahapannya dimulai dari perolehan kasus yang unik, prosesnya berlangsung secara induktif, teori digunakan sebagai piranti untuk memandu peneliti memahami fenomena, lebih menekankan kedalaman daripada keluasan kajian, dan berakhir dengan teori baru. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perilaku, proses interaksi, makna suatu tindakan, nilai, dan pengalaman individu atau kelompok, yang semuanya berlangsung dalam latar alami.

2.2.3. Analisis Data

Pendekatan efektif terhadap penganggaran ramah lingkungan didukung oleh empat landasan utama yang saling memperkuat; kerangka strategis yang kuat, alat untuk menghasilkan bukti dan koherensi kebijakan, pelaporan untuk memfasilitasi akuntabilitas dan transparansi dan kerangka tata kelola anggaran yang memungkinkan. Analisis data merupakan proses sistematis untuk mengorganisasi, menginterpretasikan, dan menyajikan data sehingga dapat diambil kesimpulan atau informasi yang berguna. Analisis data eksternal pada penelitian ini meliputi analisis perbandingan secara substantif (parameter yang diukur). Analisis data akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram secara deskriptif untuk menyajikan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini.

Alat penganggaran ramah lingkungan membantu mengumpulkan bukti tentang bagaimana ukuran anggaran berdampak pada tujuan lingkungan dan iklim. Alat-alat yang digunakan oleh masing-masing negara harus didasarkan pada kerangka PFM yang sudah ada, namun dapat mencakup antara lain sebagai berikut:

- Penandaan anggaran ramah lingkungan

- Mengklasifikasikan langkah-langkah anggaran berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan dan/atau iklim
- Analisa dampak lingkungan
- Mewajibkan analisa dampak lingkungan untuk menyertai langkah-langkah anggaran baru.
- Jasa ekosistem, termasuk karbon, penetapan harga
- Memberi harga pada eksternalitas lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca, sering kali melalui pajak dan sistem perdagangan emisi, untuk memfasilitasi pencapaian tujuan lingkungan hidup dan iklim nasional.
- Perspektif hijau dalam tinjauan pengeluaran
- Memasukkan pertimbangan dampak tindakan terhadap tujuan lingkungan hidup dan iklim nasional serta pertimbangan efisiensi.
- Perspektif hijau dalam penetapan kinerja
- Mengintegrasikan tujuan kinerja yang terkait dengan tujuan lingkungan dan iklim nasional.

Pengenalan alat-alat ini bukanlah tujuan akhir. Informasi yang dikumpulkan melalui implementasinya dapat mendukung analisis dan pengambilan keputusan anggaran yang lebih tepat, sehingga membantu pemerintah memastikan koherensi keputusan anggaran dengan prioritas strategis dan kebijakan.

2. 3. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggaran untuk kepentingan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen kebijakan di daerah seiring dengan semakin masifnya kerusakan dan bencana lingkungan hidup serta degradasi layanan lama akibat pembangunan ruang dan wilayah yang dijalankan. Dalam konteks penganggaran untuk kepentingan urusan lingkungan hidup, maka setidaknya politik anggaran daerah dapat diarahkan pada ranah pencegahan, pemulihan dan pengendalian serta promosi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat. (Rosliana, Zulfhi Surya, And Adjie 2021).

Berangkat dari praktik penganggaran pembangunan urusan lingkungan hidup di Jawa Barat, ada beberapa permasalahan politik anggaran daerah yang memiliki implikasi pada upaya pemajuan kualitas lingkungan hidup di daerah.

- *Pertama*, rendahnya komitmen pemerintahan daerah untuk mengarusutamakan kepentingan lingkungan hidup menjadi agenda prioritas kebijakan pembangunan daerah. Rendahnya komitmen ini akan berpengaruh perumusan kebijakan dan program lingkungan hidup dan kuantitas besar dan kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor lingkungan hidup.

- *Kedua*, sangat kecilnya jumlah anggaran daerah untuk urusan lingkungan hidup. Dari pemeriksaan APBD, rata-rata alokasi belanja daerah untuk urusan lingkungan hidup sekitar 1% dari total belanja pembangunan daerah. Alokasi anggaran daerah banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja gaji pegawai atau aparatur pemerintah daerah.
- *Ketiga*, anggaran lingkungan hidup yang dialokasikan pun masih belum seutuhnya untuk kepentingan lingkungan hidup. Dari satu persen yang dialokasikan masih termasuk belanja aparatur pemerintah. Jika dihitung, dari total belanja pembangunan hanya sekitar 0,6% dibelanjakan untuk kepentingan lingkungan hidup di luar belanja pegawai/aparatur pemerintah.
- *Keempat*, alokasi anggaran lingkungan hidup, belum diorientasikan bagi upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Alokasi anggaran yang sangat kecil tersebut banyak dialokasikan untuk penanganan masalah yang pada realisasinya tidak efektif, tidak menjawab masalah dan rawan dikorupsi.
- *Kelima*, rendahnya keterlibatan publik dalam proses politik perumusan anggaran lingkungan hidup. Praktik perumusan anggaran menjadi milik dan dikuasai oleh pemerintah dan parlemen daerah. Pada kebanyakan kasus, kebijakan anggaran tidak berangkat dari usulan-usulan masyarakat/kelompok/organisasi masyarakat yang bergerak di sektor lingkungan hidup. Rendahnya keterlibatan publik sudah terjadi sejak perencanaan pembangunan hingga ke tahap penganggaran di daerah mulai dari penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) hingga penetapan APBD.

Di luar APBN dan APBD sebagai anggaran negara, alokasi anggaran lingkungan hidup bersumber dari perusahaan-perusahaan baik negara dan swasta. Perusahaan memiliki tanggungjawab sosial untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat dari pembangunan dan aktivitas usahanya yang memberikan dampak terhadap lingkungan hidup sekitarnya. Namun, kontrol pemerintahan daerah untuk memastikan pemenuhan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan hidup dan publik masih sangat rendah. Kebijakan pemerintahan daerah untuk memaksa perusahaan mengeluarkan dana atau anggaran untuk kepentingan lingkungan hidup belum banyak dijalankan. Dalam praktiknya, tanggungjawab sosial perusahaan banyak dikeluarkan untuk kepentingan promosi atau iklan untuk perusahaan itu kembali.

Melihat realitas ini, maka diperlukan beragam tindakan agar kebijakan politik anggaran sektor lingkungan hidup mengalami perubahan dan alokasi anggaran bisa dibelanjakan dan memberikan dampaknya tanpa pemulihan kerusakan dan kemajuan kualitas lingkungan hidup di daerah. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan anggaran berbasis lingkungan adalah sebagai berikut:

- *Pertama*, pemerintahan daerah harus mengorientasikan kebijakan dan alokasi anggaran sektor lingkungan hidup diarahkan pada ranah

pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Kebijakan ini perlu untuk mengurangi biaya resiko kerusakan lingkungan hidup itu sendiri.

- *Kedua*, dalam ranah penanganan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, pemerintahan daerah harus membuat terobosan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memastikan tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan dan partisipasi publik dilibatkan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran.
- *Ketiga*, pemerintahan daerah harus mengurangi belanja-belanja yang tidak memiliki hubungan langsung dengan upaya pencegahan dan penanganan kerusakan lingkungan hidup.
- *Keempat*, alokasi anggaran seharusnya dikeluarkan untuk mendukung upaya-upaya nyata masyarakat/komunitas yang berpartisipasi dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang saat ini porsinya masih kecil.

Apa saja landasan yang mendasari pendekatan efektif terhadap penganggaran ramah lingkungan? Pendekatan efektif terhadap penganggaran ramah lingkungan didukung oleh empat landasan utama yang saling memperkuat; kerangka strategis yang kuat, alat untuk menghasilkan bukti dan koherensi kebijakan, pelaporan untuk memfasilitasi akuntabilitas dan transparansi dan kerangka tata kelola anggaran yang memungkinkan.



Gambar 6. The OECD Green Budgeting Framework

- Blok Pembangunan 1 – Kerangka Strategis Yang Kuat. Prioritas dan tujuan strategis pemerintah terkait lingkungan hidup dan iklim harus dijabarkan dengan jelas agar dapat membantu perencanaan fiskal. Misalnya, strategi perubahan iklim atau lingkungan hidup nasional yang menetapkan prioritas

dan tujuan yang relevan. Strategi dan rencana ini membantu memandu keputusan perpajakan dan pembelanjaan sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan nasional.

- Blok Pembangunan 2 – Alat Untuk Menghasilkan Bukti Dan Koherensi Kebijakan. Alat penganggaran ramah lingkungan membantu mengumpulkan bukti tentang bagaimana ukuran anggaran berdampak pada tujuan lingkungan dan iklim. Alat-alat yang digunakan oleh masing-masing negara harus didasarkan pada kerangka PFM yang sudah ada, namun dapat mencakup:
 - a. Penandaan anggaran ramah lingkungan – Mengklasifikasikan langkah-langkah anggaran berdasarkan dampak lingkungan dan/atau iklim.
 - b. Analisa dampak lingkungan – Mewajibkan analisa dampak lingkungan untuk menyertai langkah-langkah anggaran baru.
 - c. Jasa ekosistem, termasuk karbon, penetapan harga – Memberi harga pada eksternalitas lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca, sering kali melalui pajak dan sistem perdagangan emisi, untuk memfasilitasi pencapaian tujuan lingkungan hidup dan iklim nasional.
 - d. Perspektif hijau dalam tinjauan pengeluaran – Memasukkan pertimbangan dampak tindakan terhadap tujuan lingkungan hidup dan iklim nasional serta pertimbangan efisiensi.
 - e. Perspektif hijau dalam penetapan kinerja – Mengintegrasikan tujuan kinerja yang terkait dengan tujuan lingkungan dan iklim nasional.
- Blok Pembangunan 3 – Pelaporan Untuk Memfasilitasi Akuntabilitas Dan Transparansi. Pelaporan yang memadai kepada pemangku kepentingan terkait memfasilitasi pengawasan terhadap kualitas dan dampak penganggaran ramah lingkungan. Misalnya, alat pelaporan utama adalah Pernyataan Penganggaran Ramah Lingkungan (Green Budgeting Statement) yang menyertai anggaran, membantu memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana anggaran selaras dengan tujuan ramah lingkungan pada tahun anggaran tertentu. Pernyataan seperti ini dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan, seperti parlemen dan masyarakat, untuk membantu mereka memberikan masukan dalam pembahasan anggaran.
- Blok Pembangunan 4 – Kerangka Tata Kelola Anggaran Yang Mungkin. Kerangka anggaran modern memberikan lingkungan pendukung yang kuat bagi penganggaran ramah lingkungan. Hal ini mencakup kerangka anggaran yang menghubungkan perencanaan strategis dan penganggaran, cakupan anggaran multi-tahunan, hasil dan proses anggaran berbasis bukti, serta keterlibatan erat dengan parlemen dan masyarakat sipil. Penerapan Penganggaran Ramah Lingkungan juga didukung oleh kepemimpinan politik yang kuat, peran dan tanggung jawab pemerintah yang jelas, rangkaian implementasi yang dirancang dengan baik, sistem internal yang sesuai dengan tujuan, serta pengembangan kapasitas dan keahlian pegawai negeri sipil (OECD, 2021).

2. 4. Hasil dan Pembahasan Perencanaan Pembangunan

Hasil analisa penelitian terkait dokumen Rencana Pembangunan baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, di dapati hasil perencanaan yang mempengaruhi kebijakan anggaran dari sisi perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

2.4.1. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Mappi tahun 2005-2025

Prediksi terhadap permasalahan pembangunan yang akan muncul selama 20 tahun di Kabupaten Mappi yang di sadur dari berbagai dokumen perencanaan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup di Kabupaten Mappi pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor **endowment daerah** dan **faktor manusia**. Faktor *endowment* daerah adalah faktor-faktor yang secara *inherent (given)* dimiliki oleh daerah, yang mana daerah tidak sepenuhnya mampu mengendalikan.

Faktor *endowment* daerah tersebut antara lain adalah:

1. Posisi geografis Kabupaten Mappi --- yang terletak pada $5^{\circ}10'0''$ Lintang Utara - $7^{\circ}30'0''$ Lintang Selatan dan $138^{\circ}30'0''$ Bujur Barat - $140^{\circ}10'0''$ Bujur Timur dengan luas wilayah administratif sekitar 2.851.632,84 hektar atau 28.516,33 km^2 --- yang berbatasan langsung dengan Laut Arafura;
2. Kabupaten Mappi dikelilingi dan dilalui oleh 14 sungai besar yang terbagi menjadi 8 DAS (daerah aliran sungai) dengan lebar antara 5 meter - 900 meter dan kedalaman antara 5 meter - 28 meter;
3. Kondisi topografis Kabupaten Mappi yang didominasi oleh dataran rendah dan berawa --- sekitar 98,42% atau seluas 2.646.594,33 hektar dengan tingkat keterenggan 0-8%;
4. Jenis struktur tanah yang mayoritas berupa jenis alluvial, hidromorf kelabu, kompleks-lithosol-renzina, padosolik, dan gambut dengan tekstur yang umumnya terdiri dari pasir (sand), debu (silt), dan tanah liat (clay); dan
5. Kondisi klimatologi Kabupaten Mappi yang tergolong kawasan hujan tropis dengan musim kering pendek dan sangat dipengaruhi oleh kondisi Monsoon Tenggara yang terbawa oleh udara kering Australia --- pada periode kering rata-rata curah hujan > 60mm per-bulan, sedangkan rata-rata curah hujan 2.522 mm/tahun dengan suhu minimum antara $24^{\circ}C$ - $27^{\circ}C$ dan maksimum antara $32^{\circ}C$ - $34^{\circ}C$ serta kelembaban antara 78% - 81%.

Kondisi geomorfologis Kabupaten Mappi yang sedemikian pada banyak sisi memberikan keuntungan bagi daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan beragam permasalahan terkait dengan potensi bencana alam berupa banjir pasang-surut atau fenomena alam perairan dan dataran rendah lainnya yang sangat dipengaruhi perubahan iklim. Permasalahan banjir pasang-surut pada kawasan dataran rendah, potensi longsor dan erosi pada daerah aliran sungai

dan hulu/muara sungai, dan potensi erosi akibat banjir pasang-surut dan abrasi kawasan sepanjang garis pantai, merupakan permasalahan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi.

Permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup yang diakibatkan faktor manusia umumnya terkait dengan perilaku masyarakat yang kurang disiplin atau kurang memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut seperti misalnya kebiasaan tidak disiplin dalam membuang sampah, kurang menjaga kebersihan lingkungan, kurang memperhatikan peraturan mendirikan bangunan, kurang menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain. Kondisi perilaku masyarakat yang sedemikian juga secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kinerja pelayanan publik yang belum memadai dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;

Potensi penurunan kualitas lingkungan (udara, air, tanah) akibat rusaknya ekosistem menjadi semakin besar seiring dengan meluasnya daerah-daerah terbangun yang merubah fungsi dan peruntukkan kawasan hijau menjadi kawasan permukiman, kawasan pertanian / perkebunan atau lainnya. Disamping itu, meningkatnya volume kegiatan pembangunan juga berpengaruh terhadap meningkatnya kegiatan penebangan pohon --- *untuk kebutuhan pembangunan fisik rumah / bangunan lainnya, untuk kebutuhan ekonomi masyarakat (penambangan gaharu, kayu bakar, pembuatan perahu, atau perangkat rumah tangga lainnya), dan lain-lain.*

Menurut Dokumen RPJMD 2005 – 2025, prediksi kondisi geomorfologis dan lingkungan hidup 20 tahun yang akan datang di Kabupaten Mappi adalah sebagai berikut :

1. Dalam 20 tahun ke depan, seiring peningkatan jumlah penduduk diperkirakan jumlah kawasan perumahan dan permukiman, perkantoran, perdagangan dan industri, pertanian dan perkebunan, maupun sarana transportasi juga akan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Konsekuensi logis dari kondisi sedemikian adalah semakin besarnya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, antara lain berkurangnya luasan lahan hijau (hutan), meningkatnya sebaran dan penumpukan sampah dan polutan lainnya yang dapat menurunkan kualitas air dan tanah, serta meningkatnya paparan polusi udara.
2. Dalam kurun 20 tahun ke depan akan terjadi pergeseran fungsi dan peruntukkan ruang yang berpengaruh terhadap ekosistem dan kehidupan organisme. Dampak perubahan tersebut antara lain adalah beberapa habitat fauna dan flora akan terganggu, sehingga keanekaragaman hayati akan menurun jumlahnya dikarenakan sejumlah spesies fauna dan flora tertentu tidak dapat bertahan lagi.
3. Pengelolaan sumber daya alam dan daya dukungnya diarahkan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, generasi sekarang

dan selanjutnya.

4. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

b. Permasalahan Demografi

Permasalahan di bidang Demografi (kependudukan) yang di prediksi dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mappi adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Mappi cenderung meningkat rata-rata 2,41% per-tahun, dengan tingkat pertumbuhan terendah pada tahun 2006 (0,60% per-tahun) dan tertinggi pada tahun 2008 (4,32% per-tahun).
2. *Dependency Ratio* (Angka Beban Ketergantungan) di Kabupaten Mappi tahun 2007 mencapai 70,66 dan meningkat menjadi 73,51 pada tahun 2009, yang berarti setiap seratus penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 73,51 penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk usia produktif relatif *lebih rendah* dari penduduk usia non-produktif.
3. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki cenderung relatif lebih tinggi --- *Sex Ratio L-P tahun 2006 mencapai 104,05 dan meningkat hingga 109,90 pada tahun 2010.*
4. Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Mappi pada tahun 2006 mencapai 65,40 tahun, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 65,99 tahun. Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah ± 65 tahun.

Dari kondisi kependudukan di atas dapat di proyeksikan tingkat peluang keberhasilan yang akan dapat terwujud antara lain :

1. Jumlah penduduk yang relatif masih proposional dibandingkan dengan luas wilayah, merupakan potensi sumber daya produktif bagi pembangunan daerah Kabupaten Mappi.
2. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Mappi masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan usia harapan hidup penduduk hingga di atas 65 tahun.
3. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Mappi dapat mengarahkan pengendalian jumlah penduduk untuk mencapai komposisi demografi ideal yang membentuk keseimbangan dan harmonisasi antara penduduk usia produktif dengan usia non-produktif yang dapat mendorong bonus demografi.
4. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Mappi dapat mendorong terciptanya pola distribusi penduduk yang merata secara

proporsional pada skala distrik maupun kampung, sehingga sesuai dengan kapasitas kemampulayanan prasarana dan sarana yang ada, peluang kerja dan usaha yang tersedia, potensi sumber daya yang dapat dikelola, serta seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Permasalahan kependudukan yang diprediksi timbul untuk 20 tahun kedepan dari perencanaan ini adalah :

1. Permasalahan pokok akibat pesatnya pertumbuhan penduduk antara lain adalah tingginya pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang berimbas pada tuntutan akan ketersediaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Sementara itu, kecepatan pertambahan peluang kerja yang dipengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi cenderung akan menurun daya serapnya, meskipun volume kegiatannya terus meningkat dengan varian sektor kegiatan yang terus berkembang.
2. Kebutuhan pembinaan angkatan kerja dituntut untuk mampu menghasilkan keluaran (*output*) dengan standar kompetensi yang terus meningkat seiring dengan peluang kerja yang menuntut kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan standar keterampilan tertentu, yang terkadang belum dapat terpenuhi oleh sebagian besar angkatan kerja yang ada. Peluang kerja yang tercipta dari pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak selalu memberi peluang kerja yang besar bagi kebanyakan angkatan kerja yang ada, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran.
3. Perilaku kesehatan sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yang pada saat ini belum cukup optimal, akan menurun apabila kinerja pelayanan kesehatan maupun keterbatasan prasarana dan sarana kesehatan tidak dapat memenuhi kebutuhan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Demikian pula halnya dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan sekolah anak-anak, akan menjadi surut kembali apabila kinerja penyelenggaraan kegiatan pendidikan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kondisi sedemikian akan berpengaruh terhadap keberhasilan upaya peningkatan mutu SDM sebagaimana diharapkan.
4. Persebaran dan mobilisasi penduduk berkaitan secara timbal balik dengan proses pembangunan yang terjadi di daerah apabila konsentrasi penduduk menurut sebaran tidak terkendali. Berbagai persoalan lingkungan sosial seperti lingkungan kumuh, masalah kriminalitas, kemiskinan dan lain-lain yang akan timbul dalam kurun waktu 20 tahun ke depan diharapkan dapat diatasi melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan dengan strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi.

c. Permasalahan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Permasalahan di bidang ekonomi dan sumber daya alam yang di prediksi dalam perencanaan selama 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Pada tahap awal pembangunan ekonomi di Kabupaten Mappi telah

melakukan beberapa program pembangunan bidang ekonomi yang telah dilakukan pada tahun 2003-2004 tetapi belum menunjukkan suatu peningkatan yang berarti. Pembangunan ekonomi daerah saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan suatu peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan sektor riil menunjukkan suatu pertumbuhan sama sekali belum optimal, lambannya pertumbuhan sektor riil disebabkan redahnya kinerja investasi. Kegiatan investasi belum meluas pada sektor ekonomi produktif lainnya, serta kurangnya investasi swasta.
3. Lemahnya ekonomi dan ketahanan kesejahteraan keluarga nampak pada masih banyaknya keluarga miskin mencapai 15.111 keluarga atau 71%.
4. Pada sektor pertanian yang tumbuh di kampung-kampung merupakan kehidupan penduduk miskin. Kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat kampung merupakan kemiskinan multi dimensi baik sosial dan budaya. Ekonomi yang tumbuh lambat di kampung-kampung memang dipengaruhi oleh sektor pertanian yang tumbuh secara lambat karena pengembangan sektor pertanian masih secara tradisional dan mengandalkan kekayaan alam.
5. Pengelolaan sumber daya alam masih bertumpu kepada prioritas ekonomi, sementara aspek ekologi, sosial dan kelestarian alam sering diabaikan dan bahkan lebih kepada eksploitasi secara tidak efektif dan efisien.
6. Tingkat ketimpangan antara wilayah distrik dan kampung sangat dirasakan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin. Pendapatan perkapita yang masih rendah dan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata baru mencapai 16,54%.

Dari kondisi permasalahan di bidang ekonomi dan sumber daya alam, ada beberapa peluang yang dapat dikembangkan dalam upaya menata ekonomi dan sumber daya alam Kabupaten Mappi antara lain :

1. Sumberdaya alam yang tersedia di Kabupaten Mappi memiliki karakteristik yang sesuai dengan kondisi biofisik wilayah berupa dataran rendah dengan ketinggian yang berkisar antara 0-100 mdpl (meter dari permukaan laut). Oleh sebab itu, banyak ditemukan ekosistem-ekosistem khas dataran rendah yang didominasi oleh ekosistem lahan basah (*wetland*), antara lain: ekosistem mangrove, rawa sagu, savanna, gambut, hutan hujan dataran rendah. Ekosistem-ekosistem tersebut mengandung berbagai sumber daya alam terbarukan (*renewable resources*) maupun sumber daya alam tak terbarukan (*non renewable resources*) yang sangat melimpah.
2. Sumber daya alam terbarukan (*renewable resources*), yang dimanfaatkan sebagai sumberdaya di Kabupaten Mappi hingga saat ini didominasi oleh sumberdaya alam hutan dan perikanan. Sumberdaya hutan, antara lain: kayu besi, kayu meranti dan kayu jenis campuran untuk bahan bangunan, kulit gambir, gaharu, masohi, kayu putih, anggrek, burung cenderawasih,

babi, kasuari, kangguru dan sebagainya.

3. Sumber daya alam tak terbarukan (*non renewable resources*), yang dimanfaatkan sebagai sumberdaya di Kabupaten Mappi hingga saat didominasi oleh sumber daya tambang golongan C yang meliputi: batu alam, batu bata, pasir, potensi lahan, dan potensi air. Selain itu, terdapat juga potensi dugaan bahan tambang yaitu: minyak bumi, batu bara dan gas alam.
4. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat, rawa, sungai, laut dan udara memberikan potensi untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mappi, namun terbatas jumlahnya sehingga pendayagunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab, dikelola dengan baik oleh seluruh masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah.

Proyeksi permasalahan yang akan timbul selama kurun waktu 20 tahun Kabupaten Mappi di bidang ekonomi dan pengembangan sumber daya alam adalah antara lain :

1. Pengelolaan sumber daya alam yang ekonomis dan lestari dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti pengembangan perkebunan, pertanian tanaman pangan, pertambangan rakyat masih cukup berat. Kendala rendahnya sumber daya manusia dan kurangnya modal usaha bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya alam.
2. Walaupun berperan sebagai sektor basis dalam pembentukan struktur perekonomian daerah, kinerja sektor pertanian pada umumnya masih dilakukan secara tradisional untuk kepentingan konsumsi dan bukan untuk kepentingan produksi dalam rangka pembentukan modal. Hal ini dikarenakan sektor pertanian di daerah ini belum memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah sektor-sektor lain.
3. Kegiatan perikanan atau peternakan (pembinaan ekonomi masyarakat/pemberdayaan masyarakat petani/peternak) yang seharusnya menjadi andalan masyarakat Kabupaten Mappi ternyata belum memberikan kontribusi yang signifikan. Hal ini antara lain dikarenakan oleh kualitas SDM dan peralatan pendukung usaha belum memadai, ketidakmampuan atau tingginya biaya mengakses pasar dan berbagai faktor lain.
4. Peran dan fungsi pelayanan lembaga-lembaga keuangan (perbankan) belum sepenuhnya menjabarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pelaku ekonomi kerakyatan (UKM dan Koperasi) disebabkan beragam permasalahan yang menjadi kendala dalam teknis operasional di lapangan yang serba kompleks dan dimensional dihubungkan dengan kondisi alam serta fasilitas pendukung yang berada di luar kapasitas dan kompetensi institusi yang bersangkutan.
5. Industri dan perdagangan, dua sektor penyedia lapangan kerja yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi belum

menampakkan keadaan yang menggembirakan. Masalah yang dihadapi dalam pembinaan industri kecil dan menengah adalah lemahnya permodalan (mesin/peralatan industri), keterampilan tenaga kerja belum berkembang, kurangnya kemampuan penyerapan teknologi (tidak didukung latar belakang pendidikan yang sesuai) dan spesialisasi bidang industri belum dikuasai secara baik.

6. Di sektor perdagangan, permasalahannya meliputi kurangnya infrastruktur perdagangan (pasar), belum adanya lokasi yang strategis bagi para pedagang melakukan aktivitasnya.
 7. Belum dikembangkannya sektor pariwisata walaupun ada objek wisata yang depot dipromosikan seperti kepala arus, daerah rawa dan taman angrek
- d. Permasalahan Sosial Budaya dan Politik

Permasalahan sosial dan politik di Kabupaten Mappi yang diprediksi akan muncul dan berkembang selama 20 tahun perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Dengan belum terbangunnya secara signifikan *check and balances* kekuasaan di antara legislatif dan eksekutif, rendahnya ketidaksinergian baik yang bersifat vertikal yaitu antara Kabupaten, Provinsi dan antara Kabupaten dengan Kabupaten yang berdekatan dalam hal kebijakan. Hal lain yang ditemukan adalah masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah, belum terlaksananya prinsip-prinsip atau paradigma penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*).
2. Posisi masyarakat yang masih berada dalam posisi marginal dalam rekrutmen dan pembuatan kebijakan publik, meskipun kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan peluang yang besar bagi penguatan masyarakat. Budaya politik lokal masih jauh tertinggal dalam hal hak dan kewajiban politiknya menyebabkan masih mudahnya provokasi dan militan ketimbang toleran.
3. Transisi demokrasi melalui otonomi daerah dan otonomi khusus, dimana Kabupaten Mappi sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Papua terdapat konsekuensi dari masa transisi tersebut yaitu, primodialisme yang menimbulkan ketegangan politik antara orang asli Papua dengan orang pendatang dan antara orang asli Papua itu sendiri. Terdapatnya 4 (empat) golongan masyarakat di Papua yaitu anak asli Papua, anak peranakan, anak kelahiran dan anak pendatang merupakan komulasi dari sikap primodialis yang tinggi. Selain empat golongan masyarakat di atas masih juga terdapat perbedaan antara orang asli Papua itu sendiri yaitu orang utara dan selatan demikian pula antar suku di suatu wilayah kabupaten seperti di Kabupaten Mappi antara Yaghai dengan Awyu, Yaghai dengan Wiyagar atau sebaliknya.
4. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kehidupan, khususnya di bidang politik meningkat tajam dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Problem yang kemudian muncul ialah bagaimana lebih

meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan upaya-upaya mengantisipasi perubahan struktur pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik, dimana daerah harus memiliki kemandirian yang besar dalam penyelenggaraan pembangunan.

5. Kemiskinan di Kabupaten Mappi yang mencapai 71% dari jumlah keluarga sebanyak 15.111. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Mappi sebagian besar terjadi di kampung-kampung.

Perencanaan memberikan prediksi terhadap ancaman yang akan timbul selama masa 20 tahun perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Dalam 20 tahun mendatang, masalah budaya lokal masyarakat Yaghai, Awyu dan Wiyagar akan mengalami kepunahan atau kehilangan identitas. Hal ini disebabkan karena perkembangan globalisasi dan masuknya budaya dari luar dan pola hidup yang berubah menyebabkan berubah pula budaya asli Mappi. Bahasa daerah juga mulai mengalami penurunan dalam penggunaan dan bahkan bahasa daerah mulai tidak digunakan atau diketahui oleh generasi sekarang.
2. Masalah dalam pembangunan politik yang paling terberat adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi yang sudah terbangun di dalam proses pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung bisa tetap berjalan dengan aman dan damai dalam koridor demokrasi. Tantangan yang dihadapi adalah tingkat kesadaran politik masyarakat dan budaya politik masyarakat yang partisipatif, demokratis, bermoral, bermartabat, beretika dan ketaatan akan hukum.
3. Seiring dengan tuntutan global, kehidupan sosial budaya masyarakat turut mengalami dampak globalisasi dan modernisasi yang secara perlahan menyebabkan pergeseran nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan kehidupan politik.
4. Perkembangan pembangunan politik khususnya politik perempuan serta partisipasi anak dalam pembangunan membentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultur masyarakat yang bias gender.

e. Permasalahan Prasarana dan Sarana

Kondisi prasana dan sarana yang tersedia di Kabupaten Mappi pada saat perencanaan dilakukan adalah :

1. Untuk infrastruktur kelistrikan di Kabupaten Mappi sangat minim karena berbagai masalah baik bahan bakar minyak selain itu kemampuan produksi yang membawa dampak pada pemadaman secara rutin atau hanya menyala pada jam 17.30 WIT sampai dengan 24.00 WIT baik kota Kabupaten maupun kota-kota Distrik (Edera dan Senggo), sedangkan kampung-kampung sama sekali belum terlayani tenaga listrik. Upaya lain selama ini belum dilakukan

untuk menanggulangi keterbatasan tenaga listrik dengan mencari alternatif tenaga listrik lain.

2. Sejak terbentuknya Kabupaten Mappi tahun 2002 transportasi telah mengalami peningkatan terutama pada transportasi udara dan sungai. Namun hal ini tidak didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana transportasi sungai dan udara seperti dermaga dan bandar udara. Selain itu untuk transportasi darat dengan masih terbatasnya jalan membawa dampak pada sarana angkutan yang terbatas dan belum adanya terminal dan sarana pendukung lainnya.
3. Untuk infrastruktur pelayanan air bersih hanya Distrik Edera terutama di Bade yang sudah mendapatkan pelayanan air bersih sedangkan Kepi sebagai ibu kota kabupaten belum ada pelayanan air bersih serta 4 (empat) Distrik lainnya.
4. Belum terjangkaunya secara merata jasa telekomunikasi ke seluruh wilayah Kabupaten.
5. Belum tersedianya jalan yang menghubungkan dari ibukota kabupaten ke distrik dan antar kampung.
6. Belum terpenuhinya pemukiman dan perumahan masyarakat yang memenuhi standar huni layak dan sehat.

Proyeksi permasalahan yang mungkin timbul dari kondisi prasarana dan sarana infrastruktur di Kabupaten Mappi adalah sebagai berikut :

1. Perkampungan masyarakat sangat berpecah dan terpencil serta belum tersedianya tenaga-tenaga teknik untuk menangani pembangkit listrik dari air, angin dan matahari.
2. Belum terbangunnya lintas kota, Kabupaten, Distrik, Kampung yang dapat mengakses pusat-pusat pemukiman masyarakat dan sentra-sentra produksi.
3. Belum memadainya penguasaan teknologi pembangunan untuk mengatasi kondisi topografi dan belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung perhubungan secara memadai.

f. Permasalahan Pemerintahan

Kondisi pemerintahan di Kabupaten Mappi saat perencanaan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pelanggaran disiplin, penyalagunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi, rendahnya kinerja sumber daya aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, kesejahteraan PNS serta terbatasnya PNS yang memenuhi standar baik kepangkatan dan kapasitas yang membawa dampak kepada proses pelayanan yang tidak optimal kepada masyarakat. Profesiolisme yang merupakan tuntutan dari masyarakat bagi birokrasi, terkendala pada persoalan rendahnya tingkat kesejahteraan PNS itu sendiri
2. Masih tingginya penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek korupsi,

kolusi dan nepotisme yang merupakan dampak dari masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.

3. Masih terbatasnya kemampuan aparatur kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung membawa dampak kepada perencanaan pembangunan kampung yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat tetapi menjadi keinginan. Lemahnya sistem pemerintahan kampung dalam pengembangan pembangunan kampung membawa dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat kemiskinan yang tinggi dan berbagai masalah sosial yang menyebabkan kampung menjadi wilayah yang tertinggal.
4. Kapasitas keuangan pemerintah daerah masih terbatas, yang ditandai dengan terbatasnya efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum efisiensinya prioritas alokasi belanja daerah secara proposional serta terbatasnya kemampuan pengelolaan termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalisme.
5. Masih minimnya sosialisasi produk hukum daerah kepada masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, maka potensi permasalahan yang akan mungkin timbul antara lain adalah:

1. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) pemerintah dalam menghadapi era globalisasi, teknologi, dan informasi.
2. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pembangunan, maka kebijakan pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengikuti perkembangan zaman.
3. Batas wilayah menjadi salah satu potensi konflik disamping berkurangnya luas wilayah juga berarti pengurangan potensi sumber daya alam secara signifikan.
4. Penataan kelembagaan pemerintah Kabupaten Mappi yang belum dapat secara optimal menjalankan kewenangan, urusan dan fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
5. Minimnya aparatur yang mempunyai kualitas dan kapasitas, selain itu keterbatasan aparatur dan tingkat disiplin yang rendah.

Hasil penelitian terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi tahun 2005 – 2025 memberikan Gambaran secara jelas permasalahan yang mungkin akan timbul selama masa perencanaan 20 tahun pembangunan di Kabupaten Mappi yaitu :

Permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup di Kabupaten Mappi pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor **endowment daerah** dan **faktor manusia**.

Faktor *endowment* daerah adalah faktor-faktor yang secara *inherent*

(given) dimiliki oleh daerah, yang mana daerah tidak sepenuhnya mampu mengendalikan, faktor ini antara lain; 1. Posisi geografis Kabupaten Mappi dan letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Arafura; 2. Kabupaten Mappi dikelilingi dan dilalui oleh 14 sungai besar yang terbagi menjadi 8 DAS (daerah aliran sungai) ; 3. Kondisi topografis Kabupaten Mappi yang didominasi oleh dataran rendah dan berawa; 4. Jenis struktur tanah yang mayoritas berupa jenis alluvial, hidromorf kelabu, kompleks-lithosol-renzina, padosolik, dan gambut dengan tekstur yang umumnya terdiri dari pasir (sand), debu (silt), dan tanah liat (clay); dan 5. Kondisi klimatologi Kabupaten Mappi yang tergolong kawasan hujan tropis dengan musim kering pendek dan sangat dipengaruhi oleh kondisi Monsoon Tenggara yang terbawa oleh udara kering Australia

Kondisi geomorfologis Kabupaten Mappi yang sedemikian pada banyak sisi memberikan keuntungan bagi daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan beragam permasalahan terkait dengan potensi bencana alam berupa banjir pasang-surut atau fenomena alam perairan dan dataran rendah lainnya yang sangat dipengaruhi perubahan iklim. Permasalahan banjir pasang-surut pada kawasan dataran rendah, potensi longsor dan erosi pada daerah aliran sungai dan hulu/muara sungai, dan potensi erosi akibat banjir pasang-surut dan abrasi kawasan sepanjang garis pantai, merupakan permasalahan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi.

Permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup yang diakibatkan faktor manusia umumnya terkait dengan perilaku masyarakat yang kurang disiplin atau kurang memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut seperti misalnya kebiasaan tidak disiplin dalam membuang sampah, kurang menjaga kebersihan lingkungan, kurang memperhatikan peraturan mendirikan bangunan, kurang menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain. Kondisi perilaku masyarakat yang sedemikian juga secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kinerja pelayanan publik yang belum memadai dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;

Potensi penurunan kualitas lingkungan (udara, air, tanah) akibat rusaknya ekosistem menjadi semakin besar seiring dengan meluasnya daerah-daerah terbangun yang merubah fungsi dan peruntukkan kawasan hijau menjadi kawasan permukiman, kawasan pertanian / perkebunan atau lainnya. Disamping itu, meningkatnya volume kegiatan pembangunan juga berpengaruh terhadap meningkatnya kegiatan penebangan pohon --- *untuk kebutuhan pembangunan fisik rumah / bangunan lainnya, untuk kebutuhan ekonomi masyarakat (penambangan gaharu, kayu bakar, pembuatan perahu, atau perangkat rumah tangga lainnya), dan lain-lain.*

Menurut Dokumen RPJPD Kabupaten Mappi 2005 – 2025, prediksi kondisi geomorfologis dan lingkungan hidup 20 tahun yang akan datang di Kabupaten Mappi adalah sebagai berikut :

1. Dalam 20 tahun ke depan, seiring peningkatan jumlah penduduk diperkirakan jumlah kawasan perumahan dan permukiman, perkantoran, perdagangan dan industri, pertanian dan perkebunan, maupun sarana transportasi juga akan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Konsekuensi logis dari kondisi sedemikian adalah semakin besarnya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, antara lain berkurangnya luasan lahan hijau (hutan), meningkatnya sebaran dan penumpukan sampah dan polutan lainnya yang dapat menurunkan kualitas air dan tanah, serta meningkatnya paparan polusi udara.
2. Dalam kurun 20 tahun ke depan akan terjadi pergeseran fungsi dan peruntukkan ruang yang berpengaruh terhadap ekosistem dan kehidupan organisme. Dampak perubahan tersebut antara lain adalah beberapa habitat fauna dan flora akan terganggu, sehingga keanekaragaman hayati akan menurun jumlahnya dikarenakan sejumlah spesies fauna dan flora tertentu tidak dapat bertahan lagi.
3. Pengelolaan sumber daya alam dan daya dukungnya diarahkan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, generasi sekarang dan selanjutnya.
4. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

2.4.2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mappi 2011 – 2031

Mengacu kepada RTRW Kabupaten Mappi tahun 2011 – 2031, hasil perencanaan yang memberikan arah kebijakan anggaran berbasis lingkungan adalah :

- a. Visi Pembangunan 2011 – 2031 menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mappi Tahun 2011 – 2031 adalah membangun Mappi yang Baru, Aman, dan Damai menuju Masyarakat yang Sejahtera, mandiri, adil dan demokratis serta berkualitas dan bertanggung jawab.
- b. Misi Pembangunan menurut RTRW Kabupaten Mappi tahun 2011 – 2031 adalah sebagai berikut :
 1. Menata Kelembagaan pemerintah dan Aparatur Daerah menuju Pemerintahan yang baik (good governance) dan aparatur yang bersih (clean governance).
 2. Mempercepat Laju Pembangunan untuk mendorong percepatan Pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Masyarakat dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan dan efisien.
- c. Isu isu strategis Pembangunan dalam RTRW Kabupaten Mappi tahun 2011 – 2031 ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pendidikan dan kebudayaan
 2. Aksesibilitas dan kualitas Kesehatan

3. Penduduk miskin
 4. Ketahanan pangan
 5. Pelayanan infrastruktur wilayah
 6. Penyelenggaraan otonomi daerah dan otonomi khusus
 7. Pembangunan kampung
 8. Pengembangan ekonomi kerakyatan
- d. Tujuan yang ingin dicapai dalam penataan ruang melalui RTRW adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan Pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan;
 2. Mencapai optimalisasi dan sinergi dalam pemanfaatn sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan ketahana nasional;
 3. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan Masyarakat;
 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan;
 5. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor Pembangunan
 6. Mewujudkan percepatan Pembangunan daerah.
- e. RTRW Kabupaten mappi 2011 – 2031 di bagi dalam 2 rencana penggunaan yaitu :
1. Rencana struktur ruang yang meliputi :

Sistem pusat kegiatan wilayah yang terdiri dari :

 - a) Sistem perkotaan, antara lain Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Bade Distrik Edera, Pusat kegiatan local (PKL) Kawasan perkotaan Kepi, Kawasan Perkotaan Eci Distrik Assue dan Kawasan Perkotaan Kotiak di Distrik Passue
 - b) Sistem perdesaan, meliputi Kampung Emete, Soba, Dagimon Distrik Obaa, Kampung Agham, Koba, Ima, Kogoyaman, Tareyemu dan Magabag pada Distrik Nambioman Bapai

Sistem jaringan prasarana yang terdiri dari :

 - a) Sistem jaringan transportasi
 - b) Sistem jaringan energi
 - c) Sistem jaringan telekomunikasi
 - d) Sistem jaringan sumber daya air
 - e) Sistem prasarana poengelolaan lingkungan
 2. Rencana pola ruang yang meliputi :

Rencana pola pemanfaatan Kawasan lindung antara lain :

- a) Kawasan lindung seluas 516.290,16 ha
- b) Kawasan pengembangan hutan lindung seluas 113.522,52 ha
- c) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya seluas 44.900 ha
- d) Kawasan perlindungan setempat seluas 219.384, 26 ha
- e) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya seluas 98.570, 01 ha
- f) Kawasan rawan bencana

Rencana pengelolaan Kawasan budidaya meliputi antara lain :

- a) Kawasan hutan produksi seluas 1.982.761 ha
- b) Kawasan pertanian seluas 432.488,70 ha
- c) Kawasan Perkebunan seluas 1.163.392,02 ha
- d) Kawasan perikanan seluas 27.412 ha
- e) Kawasan industri seluas 320,91 ha
- f) Kawasan pariwisata seluas 103.571,15 ha
- g) Kawasan permukiman seluas 13.370,80 ha

Dokumen RTRW Kabupaten Mappi tahun 2011-2031 telah memberikan ruang yang luas dalam rangka merencanakan penggunaan ruang yang berbasis pada pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Mappi. Kebijakan perencanaan ini jelas terlihat dalam rencana pengalokasian penggunaan ruang dalam 2 struktur yaitu Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang memberikan arahan yang sangat jelas terhadap alokasi penggunaan ruang di wilayah Kabupaten Mappi.

Dalam Dokumen RTRW Kabupaten Mappi tahun 2011-2031 tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa tujuan dari disusunnya Dokumen RTRW ini adalah Mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan Pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, Mencapai optimalisasi dan sinergi dalam pemanfaatn sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan ketahanan nasional, Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan Masyarakat dan Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan.

2.4.3. RPJMD Kabupaten Mappi 2017 - 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting dalam menentukan arah, tujuan, kebijakan, strategi, serta program pembangunan suatu daerah untuk jangka waktu lima tahun. Dalam konteks Kabupaten Mappi, RPJMD 2017-2022 disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan yang berkesinambungan, merata, dan berkeadilan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Mappi, yang terletak di Provinsi Papua Selatan, menghadapi tantangan geografis, sosial, dan ekonomi yang khas. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan melalui RPJMD harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal agar segala kebijakan yang dirancang dapat diimplementasikan secara efektif. RPJMD Kabupaten Mappi 2017-2022 tidak hanya menjadi acuan bagi pemerintah daerah, melainkan juga sebagai landasan pembuatan kebijakan lintas sektor, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

a. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mappi 2017 - 2022

Dalam perencanaan pembangunan, penetapan visi dan misi menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat. Visi RPJMD Kabupaten Mappi 2017-2022 adalah "Terwujudnya Mappi yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Kearifan Lokal."

b. Misi utama yang mendukung visi tersebut meliputi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang merata
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan pengembangan infrastruktur
4. Melestarikan lingkungan hidup dan kearifan lokal dalam setiap program pembangunan
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

RPJMD Kabupaten Mappi 2017-2022 dirancang dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi pembangunan, antara lain:

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar: Infrastruktur transportasi, air bersih, listrik, dan telekomunikasi menjadi prioritas utama untuk membuka keterisolasian wilayah dan memperluas akses antar daerah di Kabupaten Mappi.
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat melalui program-program UMKM, pertanian, dan perikanan.
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kualitas pendidikan lewat program beasiswa dan pelatihan, serta memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar di seluruh distrik dan kampung.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: Penerapan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang prima dalam tata kelola pemerintahan daerah.
5. Pemberdayaan Potensi Lokal: Mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal, seperti produk kerajinan, pertanian tradisional, dan pengelolaan hasil hutan yang berkelanjutan.

6. Pelestarian Lingkungan Hidup: Menjaga kelestarian hutan, sungai, dan ekosistem lainnya, serta mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan.
- d. Program Prioritas dan Implementasi
- Dalam kurun waktu 2017-2022, berbagai program prioritas dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Beberapa program unggulan di antaranya:
1. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
Pembangunan jalan penghubung antar distrik dan kampung menjadi prioritas utama. Melalui program pembangunan jalan aspal dan jembatan, diharapkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi dapat terhubung dan memudahkan distribusi barang, jasa, serta akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi juga menjadi perhatian utama, mengingat sebagian besar wilayah Mappi masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan air bersih. Program penyediaan listrik desa dan pengembangan telekomunikasi juga digenjut agar masyarakat dapat merasakan manfaat kemajuan teknologi.
 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat
RPJMD Kabupaten Mappi 2017-2022 mendorong pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Diharapkan, program pelatihan dan penyuluhan kepada petani serta nelayan dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan masyarakat. Selain itu, pengembangan UMKM difasilitasi melalui akses permodalan, pelatihan manajemen usaha, serta pemasaran produk ke pasar lokal dan regional. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran.
 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan memperbaiki dan membangun sarana pendidikan serta fasilitas kesehatan. Program beasiswa daerah, pelatihan guru, peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan, serta pelayanan kesehatan keliling dilaksanakan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat di wilayah terpencil. Pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah, termasuk penyediaan transportasi sekolah dan fasilitas pendukung lainnya, menjadi salah satu terobosan untuk menekan angka putus sekolah di Mappi.
 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Penerapan sistem elektronik dalam administrasi pemerintahan serta penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Pemerintah daerah juga mengedepankan prinsip

transparansi anggaran dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

5. Pelestarian Budaya dan Lingkungan

Kabupaten Mappi dikenal dengan kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati. Program pelestarian seni, adat istiadat, serta perlindungan kawasan hutan dan sungai menjadi bagian integral dari RPJMD. Pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas adat untuk menjaga warisan budaya dan lingkungan hidup agar tetap lestari di tengah arus modernisasi.

d. Monitoring, Evaluasi, dan Kolaborasi

Keberhasilan implementasi RPJMD sangat bergantung pada proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Mappi melakukan peninjauan berkala atas capaian program, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan solusi perbaikan. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional juga menjadi kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal. Pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan turut mendorong terciptanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Tantangan dan Solusi

Dalam pelaksanaan RPJMD, berbagai tantangan ditemui, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, akses wilayah yang sulit, serta keterbatasan anggaran. Solusi yang diterapkan meliputi penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta optimalisasi sumber pendanaan melalui sinergi lintas sektor. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga, serta mendorong inovasi dalam pelaksanaan program, menjadi bagian dari strategi mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penutup

RPJMD Kabupaten Mappi 2017-2022 adalah dokumen strategis yang menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui visi, misi, strategi, dan program yang terencana dengan matang, diharapkan Kabupaten Mappi dapat tumbuh menjadi daerah yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing, sekaligus mampu menjaga kearifan lokal dan kelestarian lingkungan. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat, aparatur pemerintah, dan mitra pembangunan sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita bersama membangun Mappi yang lebih baik di masa depan.

Hasil penelitian terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Mappi Tahun 2017 – 2022 telah memberikan ruang yang cukup dengan mengakomodir kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Mappi. Hal ini terlihat dalam misi yang dengan jelas memberikan arahnya yaitu ; misi 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan pengembangan infrastruktur dan misi 4. Melestarikan lingkungan hidup dan kearifan lokal dalam setiap program pembangunan. Lebih

lanjut dalam arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mappi tahun 2017 – 2022, menetapkan arah pembangunan diantaranya adalah Pemberdayaan Potensi Lokal dengan mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal, seperti produk kerajinan, pertanian tradisional, dan pengelolaan hasil hutan yang berkelanjutan. Arah pembangunan Kabupaten Mappi selanjutnya yang sangat mengarah pada aspek lingkungan adalah Pelestarian Lingkungan Hidup dengan kegiatannya menjaga kelestarian hutan, sungai, dan ekosistem lainnya, serta mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan.

2. Lebih lanjut RPJMD Kabupaten Mappi tahun 2017-2022 dengan spesiifik menyebutkan dalam program kegiatannya yang berpihak pada pelestarian lingkungan hidup yaitu dengan menyebutkan bahwa Kabupaten Mappi dikenal dengan kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati, maka program pelestarian seni, adat istiadat, serta perlindungan kawasan hutan dan sungai menjadi bagian integral dari RPJMD. Pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas adat untuk menjaga warisan budaya dan lingkungan hidup agar tetap lestari di tengah arus modernisasi.
3. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mappi tahun 2017-2022, berbagai tantangan ditemui, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, akses wilayah yang sulit, serta keterbatasan anggaran.

2.4.4. RPD 2022 – 2026

Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mappi untuk periode 2022–2026 merupakan landasan penting dalam menentukan arah, kebijakan, strategi, serta prioritas pembangunan di wilayah ini. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, mempercepat kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada. Dalam konteks proses pembangunan daerah, RPD hadir sebagai instrumen utama pengambilan kebijakan yang partisipatif, berdasarkan kebutuhan masyarakat, berbasis data, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Visi dan Misi Pembangunan

Kabupaten Mappi menetapkan visi pembangunan daerah yang berfokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Visi ini diperkuat dengan misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan inovasi.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan partisipatif.
4. Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.
5. Meningkatkan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah terpencil.

a. Analisis Kondisi Daerah

Mappi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan karakteristik geografis berupa dataran rendah, rawa-rawa, dan sungai besar. Kondisi geografis ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan, terutama terkait pembangunan infrastruktur dasar, aksesibilitas antar wilayah dan distribusi layanan dasar. Kesejahteraan masyarakat yang masih di bawah standar sejahtera dan infrastruktur dasar yang masih terbatas menjadi isu utama yang harus segera diatasi. Dari aspek ekonomi, masyarakat Mappi menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan hasil hutan. Namun, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah akibat minimnya akses pasar, teknologi, dan modal. Dari sisi sosial, isu pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama untuk segera mendapatkan perhatian yang lebih guna peningkatan kedua isu tersebut. Tingkat partisipasi sekolah dan angka melek huruf masih perlu ditingkatkan, sementara akses terhadap layanan kesehatan dasar masih menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan fasilitas.

b. Strategi Pembangunan

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan, RPD Kabupaten Mappi 2022–2026 beberapa strategi dan arah pembangunan Kabupaten Mappi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan berkualitas Prioritas diberikan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Program pelatihan guru, penyediaan sarana belajar, serta beasiswa bagi anak-anak di daerah terpencil menjadi bagian dari strategi atau program prioritas selama masa peencanaan RPD ini.
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan sistem kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan sistem kesehatan dilakukan dengan pembangunan sisi infrastruktur maupun tenaga medis, diarahkan pada pembangunan rumah sakit di setiap wilayah, penguatan, puskesmas pada setiap distrik dan layanan kesehatan keliling guna menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
3. Memperkuat kesatuan budaya bangsa melalui aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk terbentuknya masyarakat berkarakter.
4. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
5. Peningkatan nilai tambah, kesempatan kerja dan daya saing ekonomi.
6. Penguatan kewirausahaan dan kondusivitas iklim investai dan penanaman modal.
7. Peningkatan pemerataan akses infrastruktur pelayanan dasar.
8. Peningkatan pemerataan akses infrastruktur ekonomi.
9. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.
10. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik.
11. Peningkatan profesionalisme aparatur
12. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

13. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga ketrentaman dan ketertiban.
14. Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana.
15. Peningkatan kualitas komunikasi publik.

c. Prioritas Pembangunan 2022–2026

Dalam kurun waktu lima tahun, berikut prioritas pembangunan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi:

1. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan.
2. Pembangunan jalan penghubung antar distrik dan kampung.
3. Peningkatan kapasitas dan produktivitas petani serta nelayan lokal.
4. Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi di wilayah permukiman.
5. Peningkatan literasi digital dan akses informasi untuk masyarakat.
6. Perlindungan kawasan rawa dan konservasi keanekaragaman hayati.

d. Program Unggulan

Beberapa program unggulan yang diusung dalam RPD Kabupaten Mappi 2022–2026 antara lain:

1. Program Kampung Mandiri: Mendorong kemandirian kampung melalui penguatan kelembagaan, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung.
2. Program Sagu untuk Ketahanan Pangan: Pemberdayaan masyarakat dalam budi daya dan pengolahan sagu sebagai pangan lokal unggulan.
3. Program Kesehatan Bergerak: Layanan kesehatan keliling berbasis perahu dan kendaraan khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
4. Program Infrastruktur Terpadu: Integrasi pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung penguatan ekonomi lokal.
5. Program Literasi Digital: Pelatihan keterampilan digital untuk pelajar, pelaku usaha, dan masyarakat umum guna menghadapi tantangan era digitalisasi.

e. Penutup

Perencanaan pembangunan Kabupaten Mappi periode 2022–2026 merupakan upaya kolektif untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Dengan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat, sinergi antar-lembaga, serta komitmen pada prinsip keberlanjutan, Kabupaten Mappi diharapkan mampu menjadi contoh daerah yang adaptif dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.

Kesimpulan hasil penelitian dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mappi tahun 2022-2026, dimana dokumen ini merupakan dokumen pengganti RPJMD pada masa transisi pemerintahan di Kabupaten Mappi, memberikan arahan pembangunan selama kurun waktu 3 tahun dengan hasil sebagai berikut :

1. Misi dalam RPD 2022-2026 Kabupaten Mappi antara lain adalah Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Salah satu strategi pembangunan yang di cantumkan selama 3 tahun adalah Peningkatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.
3. Prioritas pembangunan selama masa perencanaan salah satunya adalah Perlindungan kawasan rawa dan konservasi keanekaragaman hayati.
4. Sebagai program unggulan selama masa perencanaan yang ditetapkan adalah Program Sagu untuk Ketahanan Pangan dengan pemberdayaan masyarakat dalam budi daya dan pengolahan sagu sebagai pangan lokal unggulan.

2.4.5. Renstra Dinas PUPR Tahun 2017 - 2022 Kabupaten Mappi

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mappi, disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu tersebut.

Rencana Strategis ini mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari tujuan yang ditetapkan sasaran yang ingin dicapai diiringi dengan kebijakan dan program prioritas. Program - program prioritas tersebut diuraikan dalam beberapa kegiatan dengan alokasi sumber daya dan dana.

a. Visi

Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi yang selengkapnya dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Mappi 2017-2022 , mempunyai Visi yaitu : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MAPPI YANG LEBIH RELIGIUS, MANDIRI, BERMARTABAT, ADIL DAN MAKMUR “**

b. Misi

Sebagai penjabaran dari visi, maka RPJMD Kabupaten Mappi telah menetapkan 5 misi. Dari ke lima misi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mappi mengambil bagian dalam mewujudkan misi yang pertama yaitu “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar”.

Sasaran Strategis

Renstra Dinas PUPR Kabupaten Mappi tahun 2017 - 2022 menetapkan beberapa sasaran strategis dalam melaksanakan misi pertama tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan Pembangunan jalan dan jembatan.
2. Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
3. Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

4. Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang.
5. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pemerintah.

c. Strategi , program dan kegiatan

Strategi yang diterapkan dalam Renstra 2017 - 2022 meliputi:

1. Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
3. Meningkatkan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pemerintah.
5. Meningkatkan perencanaan tata ruang.

Program yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mappi adalah :

1. Penyelenggaraan jalan kabupaten / kota.
2. Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
3. Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
4. Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah.
5. Program penataan bangunan gedung.
6. Program penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Program penataan Bangunan Dan Lingkungannya.

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mappi selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Survey kondisi Jalan / Jembatan.
2. Pembangunan Jalan.
3. Rekonstruksi Jalan.
4. Pemeliharaan Berkala Jalan.
5. Normalisasi / Restorasi Sungai.
6. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa.
7. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa.
8. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa.
9. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.
10. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan.
11. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan.
12. Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.
13. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG.
14. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota.
15. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
16. Penataan Bangunan dan Lingkungan.

d. Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan Renstra 2022, Dinas PUPR Kabupaten Mappi menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur.
2. Keterisolasian lokasi pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan sulitnya distribusi material dan alat berat.
3. Kondisi geografis dan iklim ekstrim yang sering menghambat pelaksanaan proyek.
4. Tingginya harga material pembangunan, baik material lokal maupun material toko yang harus didatangkan dari luar kabupaten.
5. Keterbatasan sumber daya manusia lokal yang terampil di bidang teknik sipil dan konstruksi.

e. Penutup.

Renstra Dinas PUPR tahun 2022 Kabupaten Mappi menjadi landasan utama bagi upaya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meski menghadapi berbagai kendala, komitmen dan inovasi yang diterapkan telah menghasilkan perubahan positif yang dirasakan langsung oleh warga. Ke depan, Dinas PUPR diharapkan terus meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan demi mewujudkan Mappi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

Hasil penelitian terhadap Dokumen Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mappi tahun 2017-2022 antara lain adalah :

1. Sasaran strategis yang ingin di capai selama 5 tahun antara lain adalah Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang.
2. Ada 7 program yang direncanakan selama kurun waktu 5 tahun, dimana dari 7 program tersebut, ada 6 program yang mengarah pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam antara lain: 1. Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); 2. Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); 3. Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah; 4. Program penataan bangunan gedung; 5. Program penyelenggaraan Penataan Ruang dan 6. Program penataan Bangunan Dan Lingkungannya.
3. Kegiatan yang direncanakan selama 5 tahun waktu perencanaan yang memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan sumber daya alam adalah Normalisasi / Restorasi Sungai, Pembangunan Jaringan Irigasi, Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa, Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan

di Kawasan Perdesaan dan perkotaan, Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat, Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

4. Salah satu kendala utama untuk pencapaian program dan kegiatan tersebut adalah minimnya ketersediaan anggaran di bandingkan kebutuhan anggaran pembangunan yang dibutuhkan.

2.4.6. RKPD 2022 Kabupaten Mappi

a. Pendahuluan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sangat penting bagi arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya di daerah. Kabupaten Mappi sebagai salah satu daerah di Provinsi Papua Selatan memiliki tantangan dan potensi tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. RKPD tahun 2022 menjadi acuan strategis dalam merumuskan langkah-langkah pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi-misi kepala daerah.

b. Gambaran Umum RKPD 2022 Kabupaten Mappi

RKPD 2022 Kabupaten Mappi disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan dinamika dan tantangan aktual, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan kebijakan otonomi khusus. Dokumen ini memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Prioritas Pembangunan

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di seluruh distrik dan kampung.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, termasuk upaya penurunan angka stunting dan percepatan vaksinasi.
3. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik.
4. Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya pertanian, perikanan, dan UMKM.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

d. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan

Proses penyusunan RKPD 2022 dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten. Keterlibatan masyarakat, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan perempuan dan pemuda menjadi elemen penting dalam merumuskan prioritas dan usulan.

Setelah ditetapkan, pelaksanaan RKPD 2022 memerlukan sinergi antar perangkat daerah dan lembaga vertikal di Kabupaten Mappi. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik untuk memastikan capaian program sesuai indikator yang telah ditetapkan.

e. Capaian dan Hasil Pembangunan

Capaian pelaksanaan RKPD 2022 di Kabupaten Mappi dapat dilihat pada beberapa sektor utama sebagai berikut:

1. Pendidikan

- a) Terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah di tingkat dasar dan menengah.
- b) Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru di beberapa distrik seperti Obaa, Edera, dan Haju.
- c) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- d) Program beasiswa daerah untuk siswa berprestasi dan kurang mampu diimplementasikan secara bertahap.

2. Kesehatan

- a) Peningkatan fasilitas dan layanan puskesmas di distrik-distrik terpencil.
- b) Penurunan angka stunting melalui program gizi dan edukasi kesehatan keluarga.
- c) Peningkatan cakupan vaksinasi rutin dan penanganan COVID-19.
- d) Penyediaan air bersih dan sanitasi layak di beberapa kampung prioritas.

3. Infrastruktur

- a) Peningkatan dan perbaikan jalan penghubung antar distrik yang memudahkan mobilitas warga serta distribusi barang dan jasa.
- b) Pembangunan jembatan baru dan rehabilitasi fasilitas umum, termasuk sarana olahraga dan ruang publik.
- c) Peningkatan akses listrik dan air bersih, terutama di wilayah yang selama ini tergolong minim pelayanan.

4. Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

- a) Pengembangan pertanian lahan basah dan kering sesuai potensi lokal, seperti sagu, ubi-ubian, dan sayuran.
- b) Pelatihan dan pendampingan kelompok tani serta nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
- c) Peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan usaha rintisan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan daerah.
- d) Pengembangan pasar rakyat dan sentra ekonomi kampung untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

5. Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

- a) Peningkatan pelayanan publik berbasis digital dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
- b) Pemberlakuan sistem merit dalam pengangkatan dan promosi ASN di lingkungan Pemkab Mappi.
- c) Penegetakan prinsip akuntabilitas dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan.

6. Kendala dan Tantangan

Walaupun capaian positif telah diraih, pelaksanaan RKPD 2022 di Kabupaten Mappi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- a) Keterbatasan infrastruktur dasar yang menjadi hambatan utama distribusi barang dan jasa, terutama saat musim hujan.
- b) Keterbatasan tenaga kesehatan dan pendidik di wilayah terpencil.
- c) Akses transportasi dan komunikasi yang belum merata di seluruh distrik.
- d) Dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa pada aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat.
- e) Koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah yang perlu terus ditingkatkan.

7. Rekomendasi Perbaikan dan Tindak Lanjut

Untuk memperkuat capaian pembangunan ke depan, beberapa rekomendasi penting antara lain:

- a) Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam perencanaan dan pelaksanaan program prioritas.
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan pengawasan kegiatan pembangunan.
- c) Penguatan kapasitas SDM di bidang pendidikan dan kesehatan melalui pelatihan dan insentif khusus.
- d) Peningkatan akses transportasi, terutama melalui pembangunan infrastruktur strategis di wilayah-wilayah terisolasi.
- e) Memastikan keberlanjutan program-program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dan UMKM.

Dokumen RKPD Kabupaten Mappi tahun 2022 telah memberikan ruang yang cukup dalam rangka merencanakan kebijakan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan terhadap sumber daya alam di Kabupaten Mappi. Hal ini terlihat jelas dalam prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada bidang infrastruktur dan pengembangan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kendala yang dihadapi dalam rangka melaksanakan RKPD Kabupaten Mappi tahun 2022 adalah pada banyaknya kebutuhan akan pembangunan bila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

2.4.7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 Kabupaten Mappi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sangat penting bagi Kabupaten Mappi di Provinsi Papua Selatan dalam rangka memadukan setiap rencana kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. RKPD berperan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menjadi pijakan dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun berjalan. RKPD 2023

Kabupaten Mappi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 - 2026, serta kebijakan nasional dan provinsi, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1. Tema RKPD dan prioritas Pembangunan Kabupaten Mappi tahun 2023 Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, dan tema pembangunan Provinsi Papua Selatan, maka tema RKPD Kabup[aten Mappi tahun 2023 adalah “Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sektor strategis dan penciptaan inklusivitas yang berkelanjutan”.
2. Selanjutnya RKPD 2023 Kabupaten Mappi menetapkan beberapa prioritas utama, di antaranya:
 - a. Peningkatan nilai tambah, kesempatan kerja dan daya saing ekonomi;
 - b. Penguatan kewirausahaan serta kondusivitas iklim investasi dan penanaman modal;
 - c. Peningkatan pemerataan akses infrastruktur dasar;
 - d. Peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan;
 - e. Peningkatan pemerataan akses pelayanan pendidikan;
 - f. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - g. Memperkuat kesatuan budaya bangsa;
 - h. Pemerataan akses infrastruktur ekonomi;
 - i. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan lingkungan hidup;
 - j. Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana;
 - k. Peningkatan profesionalisme aparatur negara.
3. Strategi untuk mencapai target RKPD 2023 Kabupaten Mappi, beberapa rencana kegiatan utama dibeberapa sektor antara lain :
 - a. Infrastruktur dan Konektivitas
Pemerintah Kabupaten Mappi akan membangun dan memperbaiki sejumlah ruas jalan penghubung pusat-pusat kegiatan masyarakat dan jalan penghubung antar distrik, serta membangun jembatan di wilayah-wilayah strategis. Pembangunan dermaga dan peningkatan pelabuhan penyeberangan juga menjadi fokus untuk memudahkan distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
 - b. Sektor Pendidikan
RKPD 2023 memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah dasar hingga menengah, terutama di wilayah pedalaman dan terpencil. Pemerintah daerah juga meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan dan insentif. Program beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu semakin diperluas, sekaligus menyediakan

sarana penunjang seperti perpustakaan keliling dan perangkat teknologi pendidikan.

c. Sektor Kesehatan

Peningkatan layanan kesehatan menjadi agenda penting, antara lain dengan membangun Rumah Sakit pratama di pusat kegiatan masyarakat, membangun puskesmas baru dan memperbaiki fasilitas kesehatan yang ada, penyediaan tenaga medis yang kompeten, serta pelaksanaan program imunisasi dan pencegahan stunting. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat juga terus digalakkan, termasuk edukasi tentang pentingnya air bersih dan sanitasi.

d. Sektor Ekonomi dan UMKM

Pemerintah Kabupaten Mappi memperkuat sektor pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal seperti hasil hutan gaharu, sagu, tanaman pangan dan tanaman perkebunan karet. Bantuan modal dan pelatihan diberikan kepada pelaku UMKM misalnya mama-mama asli Papua yang bergerak di bidang UMKM, para petani, dan nelayan. Program pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda turut menjadi bagian dari strategi, dengan harapan meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi angka kemiskinan.

e. Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi digital dalam layanan publik menjadi salah satu capaian signifikan, termasuk penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan kini dapat diakses secara daring, memudahkan masyarakat dan mempercepat proses birokrasi. Penguatan kapasitas aparatur sipil negara juga dilakukan lewat pelatihan dan pengembangan kompetensi.

f. Ketahanan Pangan dan Ekologi

Kabupaten Mappi menghadirkan program ketahanan pangan dengan mendukung pengembangan sagu oleh masyarakat sebagai sumber pangan alternatif kemudian untuk pengembangan pertanian, didukung para petani lokal yang semakin maju berkembang dengan dukungan distribusi benih unggul, alat pertanian, serta pelatihan. Di sisi lain, perlindungan kawasan hutan dan ekosistem rawa menjadi prioritas, mengingat peran strategisnya bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan mitigasi perubahan iklim.

5. Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan perencanaan RKPD 2023 di Kabupaten Mappi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti:

- a) Keterbatasan akses transportasi akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau yang berakibat pada mahalnya beberapa komoditi strategis pembangunan.
- b) Keterbatasan tenaga ahli di bidang kesehatan dan pendidikan.

- c) Masih rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam beberapa program pembangunan.
- d) Pendanaan yang terbatas sehingga prioritas harus benar-benar terarah dan efisien.
- e) Luasnya wilayah pelayanan di bandingkan dengan ketersediaan anggaran dan tingginya biaya pembangunan.

6. Strategi dan Rencana Lanjutan

Untuk mengakselerasi pembangunan di tahun-tahun berikutnya, pemerintah daerah merancang beberapa strategi lanjutan, antara lain:

- a) Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam hal pendanaan dan pelaksanaan program strategis.
- b) Memperluas kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat.
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk semua aspek pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi.
- d) Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan intensif.
- e) Penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Hasil penelitian terhadap Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi (RKPD) Kabupaten Mappi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RKPD Kabupaten Mappi tahun 2023 telah memberikan prioritas pembangunan pada dua aspek yaitu peningkatan pencegahan dan penanggulangan lingkungan hidup; serta Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana;
2. Kegiatan utama dalam RKPD Kabupaten Mappi antara lain fokus pada Program ketahanan pangan dengan mendukung pengembangan sagu oleh masyarakat sebagai sumber pangan alternatif kemudian untuk pengembangan pertanian, didukung para petani lokal yang semakin maju berkembang dengan dukungan distribusi benih unggul, alat pertanian, serta pelatihan. Di sisi lain, perlindungan kawasan hutan dan ekosistem rawa menjadi prioritas, mengingat peran strategisnya bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan mitigasi perubahan iklim.
3. Kendala utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam RKPD 2023 Kabupaten Mappi antara lain adalah Pendanaan yang terbatas sehingga prioritas harus benar-benar terarah dan efisien dan luasnya wilayah pelayanan di bandingkan dengan ketersediaan anggaran dan tingginya biaya pembangunan.

2.4.8. RKPD 2024 Kabupaten Mappi

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan suatu wilayah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mappi 2024 merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mappi dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan. RKPD Kabupaten Mappi tahun 2024 telah disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, melibatkan semua stakeholder dan berkelanjutan.

Perencanaan RKPD 2024 tetap mengacu pada RKP tahun 2024, Tema RKPD Provinsi Papua Selatan tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mappi tahun 2023-2026 dengan prioritas pembangunan daerah diarahkan pada :

1. Percepatan pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan.
2. Percepatan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan.
3. Peningkatan peranserta perempuan dalam pembangunan.
4. Penguatan nilai persatuan dan kesatuan bangsa melalui aktualisasi kerarifan lokal.
5. Percepatan pembangunan ekonomi yang produktif dan berdaya saing berbasis potensi lokal dan investasi.
6. Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung ekonomi yang berwawasan lingkungan.
7. Percepatan peningkatan kualitas SDM dan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Perluasan peranserta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan penanggulangan bencana.

a. Rencana Program Prioritas dalam RKPD 2024

RKPD 2024 Kabupaten Mappi menghasilkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus pelaksanaan pembangunan selama satu tahun mendatang. Berikut rencana program prioritas masing-masing sektor yang dirumuskan:

1. Peningkatan Kualitas SDM
 - a) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan, melalui program rehab sekolah, pelatihan tenaga pengajar, dan penyediaan beasiswa untuk siswa Orang Asli Papua yang hendak melanjutkan pendidikan menengah dan tinggi.
 - b) Peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan dasar, termasuk pembangunan puskesmas baru, pengadaan dan peningkatan alat kesehatan, serta penambahan tenaga medis di daerah terpencil serta peningkatan kapasitas tenaga medis
 - c) Program penanggulangan stunting dan peningkatan gizi anak-anak, dengan pola pemberian makanan tambahan dan edukasi kesehatan keluarga.
2. Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM

- a) Pemberdayaan petani dan nelayan melalui pelatihan, penyediaan alat produksi, serta pembentukan koperasi berbasis potensi dan kearifan lokal.
 - b) Peningkatan nilai tambah komoditas lokal seperti sagu, ikan, dan hasil hutan bukan kayu melalui pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produksi.
 - c) Pemberian akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM dan pemuda kreatif.
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar
- a) Pembangunan dan perbaikan jalan penghubung antar kampung dan distrik untuk memperlancar mobilitas orang dan barang.
 - b) Peningkatan jalan penghubung antar pusat kegiatan ekonomi.
 - c) Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi di wilayah-wilayah dengan cakupan pelayanan rendah.
 - d) Pembangunan jaringan listrik desa dan perluasan jaringan telekomunikasi agar masyarakat lebih terhubung dengan dunia luar.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
- a) Digitalisasi administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.
 - b) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
 - c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan lewat forum dan aplikasi pengaduan publik.
5. Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup
- a) Pendokumentasian dan promosi budaya lokal seperti seni ukir, tari-tarian, dan bahasa daerah.
 - b) Pengelolaan kawasan rencana investasi dengan mengedepankan kebutuhan dan hak hak dasar masyarakat sebagai pemilik lahan untuk menjamin hak masyarakat dan mencegah degradasi lingkungan.
 - c) Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang ramah lingkungan dan memberdayakan ekonomi lokal.

b. Strategi Pembiayaan dan Sumber Dana

Pembiayaan program prioritas RKPD 2024 Kabupaten Mappi bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah sebagai topangan utama dalam pembiayaan program-program prioritas .
 2. Dana transfer Pemerinta pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Daan otonomi Khusus.
 3. Dana Desa dan partisipasi sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta
- c. Tantangan dan Solusi
- Dalam perencanaan dan pelaksanaan RKPD 2024, terdapat beberapa tantangan utama seperti keterbatasan infrastruktur dasar, keterpencilan wilayah, dan kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, solusi yang diambil antara lain:
1. Peningkatan sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan

d. Penutup

Dalam dokumen RKPD 2024 Kabupaten Mappi menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan fokus pada peningkatan SDM, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta pelestarian budaya dan lingkungan, diharapkan Kabupaten Mappi dapat terus berkembang menjadi wilayah yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan sinergi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan implementasi RKPD 2024 demi masa depan Mappi yang lebih baik.

Hasil penelitian terhadap Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi (RKPD) Kabupaten Mappi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RKPD Kabupaten Mappi tahun 2024 telah memberikan prioritas pembangunan pada dua aspek yaitu percepatan pembangunan ekonomi yang produktif dan berdaya saing berbasis potensi lokal dan investasi serta percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung ekonomi yang berwawasan lingkungan.
2. Kegiatan prioritas dalam RKPD Kabupaten Mappi tahun 2024 antara lain adalah Pendokumentasian dan promosi budaya lokal seperti seni ukir, tari-tarian, dan bahasa daerah; pengelolaan kawasan rencana investasi dengan mengedepankan kebutuhan dan hak hak dasar masyarakat sebagai pemilik lahan untuk menjamin hak masyarakat dan mencegah degradasi lingkungan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang ramah lingkungan dan memberdayakan ekonomi lokal.
3. Salah satu strategi dalam upaya pembiayaan yang lebih maksimal adalah dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

2.4.9. RKPD 2025 Kabupaten Mappi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat arah kebijakan, program prioritas, dan alokasi sumber daya pembangunan. RKPD 2025 Kabupaten Mappi disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah di tahun 2025 dengan berlandaskan visi dan misi daerah, memperhatikan rencana pembangunan nasional, serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tujuan yang ditetapkan dalam RKPD 2025 Kabupaten Mappi yaitu :
 - 1) Meningkatnya kualitas SDM yang kompetitif dan berkarakter.

- 2) Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
- 3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4) Menguatnya demokrasi dan stabilitas wilayah.

b. Program Prioritas

Berdasarkan hasil Musrenbang dan analisis kebutuhan daerah, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Papua Selatan (RKPD), maka RKPD 2025 Kabupaten Mappi menetapkan program prioritas, antara lain:

- 1) Percepatan pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan.
- 2) Percepatan perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan.
- 3) Penguatan nilai persatuan dan kesatuan bangsa melalui aktualisasi kearifan lokal yang ada dan berkembang di kabupaten Mappi.
- 4) Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.
- 5) Percepatan pembangunan ekonomi yang produktif dan berdaya saing berbasis potensi sumber daya lokal.
- 6) Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.
- 7) Percepatan peningkatan kualitas SDM dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.
- 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penciptaan iklim ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana.

c. Strategi Penganggaran dan Sumber Pembiayaan

RKPD 2025 Kabupaten Mappi mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran. Sumber pembiayaan utama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta potensi pendanaan dari lembaga donor dan kerjasama pemerintah-swasta.

d. Penutup

RKPD 2025 Kabupaten Mappi merupakan upaya strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan program-program prioritas yang telah direncanakan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Mappi.

Hasil penelitian terhadap Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi (RKPD) Kabupaten Mappi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RKPD Kabupaten Mappi tahun 2025 telah memberikan prioritas pembangunan pada dua aspek yaitu Percepatan pembangunan ekonomi yang produktif dan berdaya saing berbasis potensi sumber daya lokal dan

Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

2. Strategi yang ditetapkan dalam memaksimalkan pencapaian program prioritas adalah RKPD 2025 Kabupaten Mappi mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran dengan sumber pembiayaan utama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.5. Hasil dan Pembahasan Anggaran Pembangunan di Kabupaten Mappi

Hasil penelitian terhadap alokasi anggaran pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mappi selama kurun waktu 3 tahun adalah sebagai berikut :

- 2.5.1. Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mappi Tahun 2023

Tabel 2. Hasil penelitian tentang anggaran masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Mappi Tahun 2023

NO	NAMA OPD	Jumlah Anggaran (Rp.)	Ket
1	Dinas Pendidikan	310.370.019.583.00	
2	RSUD Mappi	53.683.373.689.00	
3	Dinas Kesehatan	158.887.217.627.00	
4	Dinas PUPR	218.216.153.161.00	
5	Dinas Perumahan dan kawatan Pemukiman	42.919.152.944.00	
6	Dinas Sosial	10.810.168.569.00	
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan KB	10.155.924.845.00	
8	Dinas Ketahanan Pangan	10.095.482.603.00	
9	Dinas Lingkungan Hidup	8.917.948.781.00	
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.891.005.354.00	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	14.505.932.427.00	
12	Dinas Perhubungan	25.393.332.165.00	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.307.924.549.00	
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6.983.560.288.00	
15	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	12.183.498.930.00	
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.917.841.627.00	
17	Dinas Perikanan	14.078.655.159.00	
18	Dinas Pertanian	22.771.142.661.00	
19	Dinas Perdagangan, Keperasi dan UKM	14.644.010.483.00	
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.377.873.249.00	

21	Sekretariat Daerah	115.659.430.187.00	
22	Sekretariat DPRD	44.796.113.734.00	
23	Bappeda	11.075.331.311.00	
24	BPKAD	277.086.097.811.00	
25	Badan Pendapatan Daerah	8.078.122.714.00	
26	BKPSD	10.761.550.210.00	
27	Inspektorat Daerah	9.288.173.724.00	
28	Distrik Obaa	7.318.686.054.00	
29	Distrik Nambioman Bapai	5.077.965.108.00	
30	Distrik Citak Mitak	3.713.061.169.00	
31	Distrik Edera	7.500.748.507.00	
32	Distrik Haju	4.163.845.418.00	
33	Distrik Assue	4.953.746.467.00	
34	Distrik Kaibar	3.268.016.713.00	
35	Distrik Passue	4.093.657.854.00	
36	Distrik Menyamur	3.644.954.496.00	
37	Distrik Venaha	3.171.293.276.00	
38	Distrik Syachame	2.932.365.568.00	
39	Distrik Yakomi	2.312.025.961.00	
40	Distrik Bamgi	2.818.784.584.00	
41	Distrik Passue Bawah	2.671.521.381.00	
42	Distrik Tizain	2.511.403.264.00	
43	Badan Kesatuan Bangsa	18.440.285.227.00	

2.5.2. Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mappi Tahun 2024

Tabel 3 : Hasil penelitian anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Desa (OPD) di Kabupaten Mappi Tahun 2024

NO	NAMA OPD	Jumlah Anggaran (Rp.)	KET
1	Dinas Pendidikan	404.287.857.893,00	
2	RSUD Mappi	55.568.504.741,00	
3	Dinas Kesehatan	169.112.562.551,00	
4	Dinas PUPR	237.726.855.633,00	
5	Dinas Perumahan dan kawatan Pemukiman	22.210.311.215,00	
6	Dinas Sosial	11.150.526.685,00	
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan KB	10.280.547.183,00	
8	Dinas Ketahanan Pangan	8.460.143.022,00	
9	Dinas Lingkungan Hidup	9.911.593.650,00	
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.421.420.916,00	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	13.863.431.563,00	
12	Dinas Perhubungan	19.102.482.881,00	

13	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.990.551.441,00	
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.924.755.511,00	
15	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	19.722.328.082,00	
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	15.934.780.720,00	
17	Dinas Perikanan	14.649.917.776,00	
18	Dinas Pertanian	15.050.888.513,00	
19	Dinas Perdagangan, Keperasi dan UKM	10.745.122.913,00	
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11.555.355.055,00	
21	Sekretariat Daerah	82.083.943.013,00	
22	Sekretariat DPRD	31.592.802.947,00	
23	Bappeda	15.782.231.732,00	
24	BPKAD	271.047.768.865,00	
25	Badan Pendapatan Daerah	6.011.735.157,00	
26	BKPSDM	12.466.241.999,00	
27	Inspektorat Daerah	8.945.902.801,00	
28	Distrik Obaa	6.667.284.140,00	
29	Distrik Nambioman Bapai	3.545.912.846,00	
30	Distrik Citak Mitak	3.471.611.868,00	
31	Distrik Edera	5.803.532.440,00	
32	Distrik Haju	3.327.433.111,00	
33	Distrik Assue	3.503.854.741,00	
34	Distrik Kaibar	2.359.035.503,00	
35	Distrik Passue	3.386.907.830,00	
36	Distrik Menyamur	3.159.793.883,00	
37	Distrik Venaha	2.510.710.284,00	
38	Distrik Syachame	2.481.331.092,00	
39	Distrik Yakomi	1.579.124.971,00	
40	Distrik Bamgi	1.898.660.748,00	
41	Distrik Passue Bawah	2.156.897.951,00	
42	Distrik Tizain	2.094.313.695,00	
43	Badan Kesatuan Bangsa	97.604.183.108,00	
44	Satuan Polisi Pamong Praja	6.273.318.017,00	
45	Dinas Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	6.603.487.590,00	

Dalam kurun waktu tahun 2022-2024 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mappi yang mendapatkan alokasi anggaran bila diurutkan dalam 5 besar Adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
5. Sekretariat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD utama yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menjaga kelestarian alam dan lingkungan mendapatkan anggaran antara 0,75 – 1 prosen dari jumlah anggaran dalam APBD Kabupaten Mappi.

2.6. Hasil dan Pembahasan tentang Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mappi

Hasil penelitian terkait realisasi belanja daerah pada APBD Kabupaten Mappi selama kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut :

2.6.1. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mappi tahun 2021

Tabel 4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mappi tahun 2021

NO	Uraian Belanja	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Belanja Daerah	1.244.257.683.014,00	
	1.1. Belanja Operasi	688.727.756.606,00	55,36 %
	Belanja Pegawai	270.889.434.829,00	
	Belanja Barang dan Jasa	362.823.207.230,00	
	Belaja Hibah	46.283.040.771,00	
	Belanja Bantuan Sosial	8.732.073.776,00	
	1.2. Belanja Modal	241.130.117.308,00	19,37 %
	Belanja Tanah	1.928.000.000,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	43.167.667.008,00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	99.479.400.520,00	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.131.529.400,00	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.423.520.380,00	
	1.3. Belanja Tak Terduga	45.399.206.500,00	3,65 %
	Belanja tidak terduga	45.399.206.500,00	
	1.4. Belanja Transfer	269.000.602.600,00	21,62 %
	Transfer Bantuan Keuangan	269.000.602.600,00	

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2021

2.6.2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mappi tahun 2022

Tabel 5 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mappi tahun 2022

NO	Uraian Belanja	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Belanja Daerah	1.549.452.388.425,04	
	1.1. Belanja Operasi	852.418.042.238,00	55,01 %
	Belanja Pegawai	365.387.011.512,00	
	Belanja Barang dan Jasa	450.363.939.400,00	
	Belaja Hibah	27.621.177.250,00	
	Belanja Bantuan Sosial	9.045.914.076,00	
	1.2. Belanja Modal	433.796.378.711,04	27,99 %

	Belanja Tanah	60.912.900.000,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	54.471.012.667,00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	184.143.760.131,00	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jariangan	125.601.103.913,00	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.667.602.000,00	
	1.3. Belanja Tak Terduga	14.855.748.238,00	0,96 %
	Belanja tidak terduga	14.855.748.238,00	
	1.4. Belanja Transfer	248.382.219.238,00	16,04 %
	GTransfer Bantuan Keuangan	248.382.219.238,00	

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2022

2.6.3. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mappi tahun 2023

Tabel 6 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mappi tahun 2023

NO	Uraian Belanja	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Belanja Daerah	1.493.629.791.309,00	
	1.1. Belanja Operasi	848.067.573.799,00	56,78 %
	Belanja Pegawai	358.050.941.677,00	
	Belanja Barang dan Jasa	386.786.154.223,00	
	Belanja Hibah	94.184.563.823,00	
	Belanja Bantuan Sosial	9.045.914.076,00	
	1.2. Belanja Modal	395.928.392.810,00	26,51 %
	Belanja Tanah	8.770.750.000,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	44.783.608.825,00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	122.930.591.915,00	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jariangan	218.883.592.900,00	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	559.849.170,00	
	1.3. Belanja Tak Terduga	1.662.215.000,00	0,11 %
	Belanja tidak terduga	1.662.215.000,00	
	1.4. Belanja Transfer	247.971.609.700,00	16,60 %
	Transfer Bantuan Keuangan	247.971.609.700,00	

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2023

2.6.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mappi tahun 2024

Tabel 7 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mappi tahun 2024

NO	Uraian Belanja	Jumlah (Rp.)	Keterangan
----	----------------	--------------	------------

1	Belanja Daerah	1.543.767.418.311,46	
	1.1. Belanja Operasi	1.004.261.017.478,46	65,06 %
	Belanja Pegawai	458.129.526.184,16	
	Belanja Barang dan Jasa	375.052.506.296,00	
	Belanja Hibah	161.076.600.998,00	
	Belanja Bantuan Sosial	10.002.384.000,00	
	1.2. Belanja Modal	288.048.056.433,00	18,66 %
	Belanja Tanah	00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	26.827.943.942,00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	106.356.560.991,00	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jariangan	154.001.551.500,00	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	862.000.000,00	
	1.3. Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	0,19 %
	Belanja tidak terduga	3.000.000.000,00	
	1.4. Belanja Transfer	248.458.344.400,00	16,09 %
	Transfer Bantuan Keuangan	248.458.344.400,00	

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2024

Prosentase terbesar belanja dalam APBD Kabupaten Mappi dalam kurun waktu 2021 – 2024 adalah pada belanja operasi, di lanjutkan dengan belanja modal, belanja transfer dan belanja hibah. Kebijakan anggaran yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan sumber daya alam, posisinya pada pos belanja modal.

2.7. Hasil dan pembahasan Alokasi belanja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah

Hasil penelitian tentang alokasi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai sample terpilih.

Di bawah ini akan disajikan hasil penelitian terhadap sample terpilih dari Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mappi yang dianggap mempunyai korelasi kuat dengan alokasi anggaran yang berbasis pada lingkungan. OPD terpilih tersebut adalah :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mappi;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mappi;
3. Dinas Pertanian Kabupaten Mappi;
4. Dinas Perikanan Kabupaten Mappi dan
5. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi.

Rincian alokasi anggaran di rinci per program dan per kegiatan dan sub kegiatan, sehingga lebih mudah menganalisa kebijakan anggarannya apakah berpihak pad lingkungan dan keberlanjutan atau belum. Sebagai sample, alokasi anggaran per program / kegiatan dan sub kegiatan ini akan di ditampilkan dalam tahun 2023 dan 2024.

2.7.1. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Mappi tahun 2022

Tabel 8 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Mappi tahun 2022.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan penyusunan Lapotan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	19.233.000,-	
	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.707.405.727,-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.248.560.000,-	
	Kordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	43.040.000,-	
	Kordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan / semesteran /	18.281.000,-	
	Administrasi Barang Milik Daerah		
	Pengamanan Barang Milik Daerah	72.000.000,0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan bahan logistik kantor	163.928.472,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	107.379.000,-	
	Fasilitasi kunjungan tamu	75.000.000,-	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	710.762.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	445.000.000,-	
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.241.600,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan , pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional	427.270.000,-	
	Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan perijinan alat angkutan darat tak bermotor	108.000.000,-	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	55.350.000,-	
	Pemeliharaan aset tetap lainnya	15.000.000,-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		

	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada Daerah Irigasi Kab / Kota		
	Pembangunan Jaringan irigasi Rawa	4.360.940.000,-	
	Peningkatan jaringan irigasi rawa	1.932.000.000,-	
	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa	68.471.000,-	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH		
	Pengelolaan dan pengembangan SPAM Kabupaten / Kota		
	Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan perdesaan	4.882.466.250,-	
	Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di kawasan perdesaan	1.635.708.750,-	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) di kabuapten		
	Pembangunan / penyediaan sub sistem pengolahan setempat (septi tank)	4.200.558.000,-	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
	Penyelenggaraan jalan kabupaten		
	Survei kondisi jalan		
	Pembangunan jalan	23.484.083.000,-	
	Rekonstruksi jalan	79.258.355.204	
	Pemeliharaan berkala jalan	4.279.701.400,-	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	55.600.000,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Kabupaten Mappi tahun 2022

2.7.2. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi tahun 2022

Tabel 9 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi tahun 2022.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.054.675,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar kinerja SKPD	7.134.675,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.120.126.059,-	
	Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.121.820.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.554.675,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / semesteran SKPD	7.554.675,-	
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan nKantor	39.086.273,-	
	Penyediaan bahan logistik kantor	73.618.904,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	78.286.000,-	
	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	601.773.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan	450.000.000,-	
	Pengadaan Mebelair	61.000.000,-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	50.233.180,-	
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	36.900.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas dan atau jabatan	234.568.000,-	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.344.717,-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	161.466.000,-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		

	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten		
	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Lainnya	18.720.000,-	
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan		
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya local	2.315.749.256,-	
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	186.420.000,-	
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / KOTA		
	Registrasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	154.008.100,-	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	206.023.000,-	
5	PROGRAM PENANGANAN KERAWANANA PANGAN		
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan		
	Penyusunan , Pemutahiran, dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	75.650.000,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi Tahun 2022

2.7.3. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mappi tahun 2022

Tabel 10 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mappi tahun 2022

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.836.003.594,-	
	Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	510.840.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / semesteran SKPD	8.200.000,-	
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.798.950,-	
	Penyediaan bahan logistik kantor	72.614.723,-	

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	52.402.225,-	
	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	363.704.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	30.400.000,-	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36.180.000,-	
	Peemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	51.900.000,-	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20.300.000,-	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	00,-	
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang Ijin Lingkungan Hidup dan ijin PPLH oleh Kabupaten		
	Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang ijin lingkungan hidup, ijin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah	56.716.000,-	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
	Pengelolaan Sampah		
	Pengurangan sampaah dengan melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan pembatasan kembali	10.500.000,-	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan di TPA/TPST/SPA Kabupaten	2.051.242.400,-	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan Kabupaten		
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	36.350.000,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mappi Tahun 2022

2.7.4. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Mappi tahun 2022

Tabel 11 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Mappi tahun 2022.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	4.318.192.927,-	
	Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.749.120.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.174.675,-	
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	1.833.600	
	Penyediaan bahan logistik kantor	88.357.606,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.637.759,-	
	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	398.078.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.500.000,-	
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa urusan surat menyurat	17.500.000,-	
	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	50.900.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas dan atau jabatan	83.160.000,-	
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	10.150.000,-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah sungai , danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di kabupaten		
	Penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	11.483.738.250,-	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / KOTA		
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	444.252.373,-	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	00,-	
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	00,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Mappi Tahun 2022

2.7.5. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mappi

Tabel 12 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mappi tahun 2022.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.058.821.589,-	
	Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.698.200.000,-	
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.848.976,-	
	Penyediaan bahan logistik kantor	49.567.069,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.159.000,-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.425.000,-	
	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	106.320.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.791.211,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air	35.000.000,-	
	Pemeliharaan Barang MilikmDaerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas atau dinas jabatan	50.000.000,-	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas atau dinas jabatan	49.944.000,-	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas , teknologi Spesifik Lokal	446.100.000,-	
	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas , teknologi Spesifik Lokal	488.000.000,-	
	Pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikro organisme wilayah kabupaten		

	Pemanfaatan SDG Hewan / tanaman	16.000.000,-	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
	Pengembangan sarana Pertanian		
	Pengelolaan lahan pertanian dengan berkelanjutan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan berkelanjutan	3.767.350.000,-	
	Pembangunan Sarana Pertanian		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.037.700.000,-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana Pendukungnya (rehabilitasi BPP)	667.955.000,-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana Pendukungnya (Peralatan dan Mesin)	528.188.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasana Pertanian Lainnya	2.944.000.000,-	
4	PROGRAM KEGIATAN PEMBIBITAN TANAMAN (BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA)	00,-	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian		
	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan	97.099516,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Mappi tahun 2022

2.7.6. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Mappi

Tabel 13 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Mappi tahun 2023.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan penyusunan Lapotan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12.360.00,-	
	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah	9.234.946,-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.954.286.530,-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.239.440.000,-	
	Kordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	25.620.000,-	

	Kordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan / semesteran /	15.600.000,-	
	Pengamanan Barang Milik Daerah		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan bahan logistik kantor	150.000.000,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	150.000.000,-	
	Fasilitasi kunjungan tamu	70.000.000,-	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.185.200.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	375.000.000,-	
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.000.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan , pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional	312.680.000,-	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	16.160.000,-	
	Pemeliharaan aset tetap lainnya	12.443.651,-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan pengaman pantai dan daerah sekunder lainnya		
	Normalisasi Sungai	2.500.000.000,-	
	Perencanaan Normalisasi Sungai	115.000.000,-	
	Pengawasan Normalisasi Sungai	148.000.000,-	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada Daerah Irigasi Kab / Kota		
	Rehabilitasi Jaringan irigasi Rawa	5.905.163.000,-	
	Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi rawa	152.700.000,-	
	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa	399.990.000,-	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH		
	Pengelolaan dan pengembangan SPAM Kabupaten		
	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan kabupaten	915.800.000,-	

	Belanja Bahan kimia	236.500.000,-	
	Belanja bahan bakar dan pelumas	212.000.000,-	
	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	22.932.000,-	
	Belanja Listrik	128.000.000,-	
	Belanja lembur pegawai	106.368.000,-	
	Belanja pemeliharaan peralatan angkutan air	80.000.000,-	
	Belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan dan pemurnian air	130.000.000,-	
	Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di kawasan perdesaan		
	Peningkatan SPAM Bade	207.476.000,-	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) di kabuapten		
	Pembangunan / penyediaan sub sistem pengolahan setempat (septi tank)	2.000.000.000,-	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan sungai di kabupaten		
	Pengembangan sistem drainase lingkungan	500.000.000,-	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabuapten, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Banguna Gedung		
	Penyelenggaran penerbitan IMB dan SLF serta implementasi SIMBG	300.000.000,-	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan bangunan gedung di kabupaten	18.945.122.000,-	
	Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten	84.332.000,-	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten		
	Penyusunan Rencana kebijakan , strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan (Taman Kota)	7.250.000.000,-	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
	Penyelenggaraan jalan kabupaten		
	Survei kondisi jalan	370.400.000,-	

	Pembangunan jalan	31.032.258.000,-	
	Rekonstruksi jalan	131.944.388.000,-	
	Pemeliharaan berkala jalan	3.272.433.500,-	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kabupaten		
	Pelaksanaan persetujuan substansi , evaluasi dan penetapan RTRW	500.000.000,-	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	430.000.000,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Kabupaten Mappi tahun 2023

2.7.7. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 14 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi tahun 2023.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.435.850,-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.497,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar kinerja SKPD	6.435.353,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.299.763.350,-	
	Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.026.600.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6.841.353,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / semesteran SKPD	5.999.353,-	
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan bahan logistik kantor	46.487.884,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.000.000,-	
	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	162.555.000,-	
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	30.000.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		

	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas dan atau jabatan	59.400.000,-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi harga		
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	3.000.100.000,-	
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	499.999.813,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi Tahun 2023

2.7.8. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 15 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mappi tahun 2023.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.630.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.630.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar kinerja SKPD	25.395.000,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.058.128.812,-	
	Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	543.360.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / semesteran SKPD	16.400.000,-	
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan bahan logistik kantor	50.801.790,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.260.000,-	
	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	210.786.000,-	
	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	1.619.100,-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1.843.529,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.000.000,-	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	787.500.000,-	
	Pengadaan Mebel	81.900.000,-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.175.000,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	49.340.000,-	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	18.000.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	81.770.000,-	
	Penyediaan jasa pemeliharaan pajak kendaraan opsional	55.914.730,-	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.240.000,-	
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	42.000.000,-	
	Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	43.000.000,-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	208.305.000,-	
	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Per-UU an	172.555.000,-	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	618.268.000,-	
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang Ijin Lingkungan Hidup dan ijin PPLH oleh Kabupaten		
	Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang ijin lingkungan hidup, ijin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah	160.243.000,-	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
	Pengelolaan Sampah		
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan di TPA/TPST/SPA Kabupaten	2.062.609.820,-	
	Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	131.524.000,-	

5	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan Kabupaten		
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	44.750.000,0	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mappi Tahun 2023

2.7.9. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Mappi

Tabel 16 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Mappi tahun 2023.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar kinerja SKPD	5.000.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	4.318.192.927,-	
	Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.749.120.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.000.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / semesteran SKPD	3.000.000,-	
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	1.767.500,-	
	Penyediaan bahan logistik kantor	32.974.262,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.630.480,-	
	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	80.000.000,-	
	Fasilitasi kunjungan tamu	19.970.000,-	
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa urusan surat menyurat	5.000.000,-	

	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	30.000.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas dan atau jabatan	45.000.000,-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah sungai , danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di kabupaten		
	Penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.091.800.000,-	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
	Pengelolaan Budidaya Ikan		
	Pembangunan Kolam Ikan Sistem Bioflok	248.000.000,-	
	Pengadaan Benih dan Pakan Ikan	479.000.000,-	
	Pengadaan keramba jaring apung	945.000.000,-	
	Pendampingan dan Pembinaan Budi daya Ikan	25.275.000,-	
	Distribusi Ikan ke masyarakat	9.450.000,-	
	Belanja cetak	2.375.000,-	
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
	Peningkatan ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan usaha Pengolahan dalam Kabupaten		
	Pembangunan Cold Storage	2.500.000.000,-	
	Pengadaan pembangkit listrik 100 KVA	352.000.000,-	
	Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Cold Storage	81.750.000,-	
	Monitoring	24.050.000,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Mappi Tahun 2023

2.7.10. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mappi

Tabel 17 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mappi tahun 2023.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.058.821.589,-	
	Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.229.500.000,-	
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.613.000,-	
	Penyediaan bahan logistik kantor	39.361.659,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	59.429.000,-	
	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	256.517.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.800.000,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menurat	4.000.000,-	
	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air	20.000.000,-	
	Pemeliharaan Barang MilikmDaerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas atau dinas jabatan	152.820.000,-	
	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	89.520.000,-	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas , teknologi dan lokasi	1.100.000.000,-	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.678.365.000,-	
	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari	360.000.000,-	
	Pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikro organisme wilayah kabupaten	20.000.000,-	
	Peningkatan kualitas SDG Hewan / tanaman	20.000.000,-	
	Penyediaan Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya di Kabupaten		
	Pengadaan Bibit Ternak Itik, Pakan dan Alat penetas	271.800.000,-	

	Pembangunan Kandang Itik	156.000.000,-	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
	Pengembangan sarana Pertanian		
	Pengelolaan lahan pertanian dengan berkelanjutan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan berkelanjutan	4.352.500.000,-	
	Peralatan dan perkakas bengkel Alsintan	200.000.000,-	
	Revitalisasi Sagu	499.650.000,-	
	Optimalisasi lahan sawah dan panen raya	2.688.106.950,-	
	Pengadaan Benih Sayuran	300.000.000,-	
	Kajian Tebu Rawa	235.000.000,-	
4	PROGRAM KEGIATAN PEMBIBITAN TANAMAN (BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA)		
	Monitoring dan evaluasi	117.500.000,-	
	Pembangunan Sarana Pertanian		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
	Pembangunan Jalan Usaha Tani	1.900.000.000,-	
	Perencanaan dan Pengawasan pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Mappi tahun 2023

2.7.11. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Mappi

Tabel 18 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Mappi tahun 2024.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA		
	Administrasin Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.344.529.706,-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.326.350.000,-	
	Pengamanan Barang Milik Daerah		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	67.500.000,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		

	Penyediaan bahan logistik kantor	57.860.000,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000,-	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	302.640.000,-	
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.000.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan , pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional	60.000.000,-	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		
	Pemeliharaan aset tetap lainnya		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan pengaman pantai dan daerah sekunder lainnya		
	Normalisasi sungai	3.760.000.000,-	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada Daerah Irigasi Kab / Kota		
	Rehabilitasi Jaringan irigasi Rawa	2.375.000.00,-	
	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa	326.000.000,-	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH		
	Pengelolaan dan pengembangan SPAM Kabupaten		
	Penyusunan Rencana, strategi, Kebijakan dan Teknis SPAM	300.000.000,-	
	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan kabupaten	1.000.000.000,-	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) di kabuapten		
	Penyediaan subsistem pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	1.124.907.500,-	
	Penyusunan Rencana, strategi, Kebijakan dan Teknis SPALD	300.000.000,-	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan sungai di kabupaten		

	Pengembangan sistem drainase lingkungan	22.432.500,-	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabuapten, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Banguna Gedung		
	Penyelenggaran penerbitan IMB dan SLF serta implementasi SIMBG	200.000.000,-	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan bangunan gedung di kabupaten	75.634.321.142,-	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten		
	Penataan bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan sistem Perkotaan dan Kawasan strategis lainnya (Penataan Taman Kota)	5.911.632.089,-	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
	Penyelenggaraan jalan kabupaten		
	Survei kondisi jalan	370.400.000,-	
	Pembangunan jalan	31.018.032.970,-	
	Rekonstruksi jalan	103.566.881.726,-	
	Pemeliharaan berkala jalan	3.587.568.000,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Kabupaten Mappi tahun 2024

2.7.12. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi

Tabel 19 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi tahun 2024.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.502.497,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar kinerja SKPD	6.435.353,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.134.025.810,-	
	Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	799.200.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6.841.353,-	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / semesteran SKPD	6.089.353,-	
	Admnistrasi Umum Kepegawaian Daerah		
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta kelengkapannya	78.000.000,-	
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14.902.976,-	
	Penyediaan bahan logistik kantor	62.328.047,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90.821.000,-	
	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	72.824.000,-	
	Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
	Pengadaan Mebel	33.311.326,-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	103.802.500,-	
	Pengadaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	30.000.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan bermotor dinas	59.400.000,-	
2	PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan		
	Penyediaan Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	250.646.807,-	
	Koordinasi dan Sonkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	500.000.000,-	
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten		
	Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup Kabupaten	1.451.410.000,-	
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.548.590.000,-	
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten		
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	113.896.000,-	
	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan	84.116.000,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mappi Tahun 2024

2.7.13. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mappi

Tabel 20 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mappi tahun 2024.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.648.910.380,-	
	Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	360.450.000,-	
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan bahan logistik kantor	11.385.279,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.258.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pememrintah Daerah		
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	247.000.000,-	
	Pengadaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	27.590.000,-	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	9.000.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan pajak kendaraan dinas	22.000.000,-	
	Penyediaan jasa pemeliharaan pajak kendaraan opsional	25.000.000,-	
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	42.000.000,-	
2	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) DAN KEARIFAN LOKAL MHA DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH		
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan han PPLH terkait dengan PPLH		
	Pemberdayaan kemitraan , Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA , Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Terkait PPLH	1.500.000.000,-	
3	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		

	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan Kabupaten		
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	4.500.000.000,-	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal / Lembaga Masyarakat / Komunitas Kelompaok Masyarakat	500.000.000,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mappi Tahun 2024

2.7.14. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Mappi

Tabel 21 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Mappi tahun 2024.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.839.675,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar kinerja SKPD	5.999.675,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.999.675,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.999.675,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.803.948.818,-	
	Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.416.000.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.349.675,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / semesteran SKPD	5.999.675,-	
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	3.681.250,-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.630.000,-	
	Penyediaan bahan logistik kantor	79.483.033,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.266.910,-	
	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	463.820.00,-	
	Fasilitasi kunjungan tamu	52.560.000,-	
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

	Penyediaan jasa urusan surat menyurat	15.000.000,-	
	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	50.000.000,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Kendaraan operasional atau Lapangan	585.000.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas dan atau jabatan	85.000.000,-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000,-	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
	Pemberian pendampingan , Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan pendidikan pelatihan	44.124.057,-	
	Pengelolaan Budi Daya ikan		
	Penjaminan Keterseidaan Budi Daya ikan dalam wilayah Kabupaten	2.255.173.253,-	
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
	Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keccil		
	Pelaksanaan bimbingan dan Penerapan Persyaratan dan Standar pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Skala Mikro dan Kecil	256.241.805,-	
	Penyedeiaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam kawasan Kabupaten		
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	1.086.100.000,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Mappi Tahun 2024

2.7.15. Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mappi

Tabel 22 Rincian alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mappi tahun 2024.

No.	PROGRAM / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.003.638.901,-	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1.859.400.000,-	
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan bahan logistik kantor	30.410.962,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.912.000,-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,-	
	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	106.720.000,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air	15.000.000,-	
	Pemeliharaan Barang MilikmDaerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas atau dinas jabatan	76.220.000,-	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas , teknologi dan lokasi	600.000.000,-	
	Penyediaan Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya di Kabupaten		
	Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari Kabupaten / Kota Lain	699.998.903,-	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
	Pengembangan sarana Pertanian		
	Pengelolaan lahan pertanian dengan berkelanjutan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan berkelanjutan	3.055.000.000,-	
	Pembangunan Sarana Pertanian		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	1.810.588.000,-	
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
	Pengembangan Kapasitas kelembagaan Petani di kecamatan dan Desa	299.999.747,-	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	445.000.000,-	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Mappi tahun 2024

Dari 5 sample OPD yang ditentukan, di temukan bahwa alokasi anggran terbesar dari program, kegiatan dan sub kegiatan adalah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah dan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta sub kegiatan Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Kebijakan anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelestarian alam dan sumber daya alam dari 5 OPD terpilih tersebut alokasinya cukup tersedia. Tetapi dalam rincian kegiatannya belum mengarah pada kegiatan pelestarian alam tetapi pada belanja operasional yang dampaknya tidak signifikan terhadap pelestarian alam dan sumber daya alam yang tersedia.

Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, kebijakan anggarannya belum secara signifikan mengalokasikan program dan kegiatan yang berpiha pada pelestarian alam dan lingkungan serta sumber daya

2.8. Kesimpulan dan Rekomendasi

2.8.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil analisa data-data yang disajikan, maka beberapa hasil analisa yang dapat di kemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Proses perencanaan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan anggaran, telah memberikan pedoman dan arahan yang jelas yang mengarah pada kebijakan anggaran yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan.
- b. Dalam proses penganggaran, para pengambil kebijakan belum sepenuhnya berpihak pada perencanaan yang berpihak bagi upaya pelestarian alam dan lingkungan. Kebijakan penganggaran di Kabupaten Mappi masih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan peningkatan ekonomi.
- c. Realisasai belanja program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, ditemukam bahwa realisasi belanja daerah masih berada pada belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja hibah. Sedangkan belanja yang berkaitan langsung dengan pelestarian lingkungan nihil, yang dibuktikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup yang tidak menganggarkan program pelestarian lingkungan.

2.8.2. Saran

Setelah menganalisa dan menyimpulkan data data penelitian, maka ada beberapa saran yang kami kemukakan yaitu :

- a. Mempertahan pola penyusunan dokumen perencanaan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga tetap tersedia ruang kebijakan anggaran bagi program pelestarian alam dan sumber daya, pada saat jumlah anggaran tersedia secara memadai;
- b. Lebih mempertajam perencanaan yang berbasis data, secara khusus untuk program yang berbasis lingkungan, sehingga bisa akomodir dalam proses penganggaran dan selanjutnya dapat dilaksanakan .

3. Daftar Pustaka

- A Afandi, M. N. (2014). *Implementasi kebijakan pembangunan di kawasan Bandung Utara dalam perspektif pembangunan berwawasan lingkungan*. **Jurnal Ilmu Administrasi**, 11(2), 225–244.
- Ansari, H., & Tahir, M. I. (2023). *Green Public Procurement dalam pembangunan berkelanjutan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tersedia pada: <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/988/1/BUKU-GREEN-PUBLIC-PROCUREMENT.pdf>
- Azzahra, L., Pamungkas, P., & Trinarningsih, W. (2022). Application of green budgeting in finance and development policy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1114(1), 012101. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1114/1/012101>
- Bappeda. (2020). *Bab VI: Strategi arah kebijakan dan program pembangunan*

- daerah (Perubahan RPJMD 2018–2023)* (Vol. 5, pp. 1–54).
- Chabib, S., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Coganuli, H. T., & Adhariani, D. (2023). Perancangan implementasi green budgeting pada PT. ABC menuju green company. *Owner*, 7(4), 3255–3266. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1699>
- Faqih, A. F., Hadi, S. P., & Purnaweni, H. (2017). Analysis on the implementation of green budgeting in Central Java province. *Advanced Science Letters*, 23(9), 8708–8711. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.8708>
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan fiskal Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam: Studi kasus dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1), 72–82.
- Finance, I. D. of. (2022). *Budget 2022: A review of green budgeting from a tax perspective*.
- Guntoro, D. (2018). Implementasi kebijakan anggaran menuju good governance. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(5), 847–857. <https://doi.org/10.54783/jv.v11i5.250>
- Hardinandar, F. (2020). Peran kebijakan fiskal terhadap trade-off antara ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. *Inovasi*, 16(1), 1–10.
- Hélène, L.-L. (2019). *Paris Collaborative on Green Budgeting: 2nd Green Budgeting Experts Meeting*.
- Hidayat, A. (2022). Implementasi pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 5(2), 55–62. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.624>
- Hidayati, S. N., Suyono, J., & Hartomo, D. D. (2022). The role of budgeting in realizing a green economy and economic growth. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1114(1), 012077. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1114/1/012077>
- Hidayattuloh, M. H., Bambang, A. N., & Amirudin, A. (2019). Environmental-based budget planning in the Tegal Regency Government. *E3S Web of Conferences*, 125, 02005. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912502005>
- Holmes, J., & Thomas, M. (2015). Introducing the smart villages concept. *The International Journal on Green Growth & Development*, 1(2), 125–131.
- Kao, J. J., Pan, T. C., & Lin, C. M. (2009). An environmental sustainability-based budget allocation system for regional water quality management. *Journal of Environmental Management*, 90(2), 699–709. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.01.003>
- Kete, H. (2022). Green budgeting: France and Italy practices. *Uluslararası Sosyal Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi*, 2(2), 102–115.
- Kurniawan, B., et al. (2020). Green budgeting policy of Gresik Regency Government. In *3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)* (pp. 317–320). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200620.054>
- Mahdalena, A., & Haliah. (2022). Local government budget orientation. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.26487/hebr.v6i1.3457>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah (Edisi terbaru)*. Penerbit Andi.
- Marinheiro, C., Sousa, A., & Pinheiro, A. (2022). The climate dimension of fiscal

- policy sustainability: Best practices in green budgeting and lessons for Portugal. *Conselho das Finanças Públicas*, (01), 1–24. <https://ideas.repec.org/p/alf/wpaper/2022-01.html>
- Marlowe, J. (2015). Local government fiscal condition before and after the Great Recession. In *Local Government Budget Stabilization: Explorations and Evidence* (pp. 51–73).
- Milán-García, J., et al. (2019). Sustainable local development: An overview of the state of knowledge. *Resources*, 8(1), 31. <https://doi.org/10.3390/resources8010031>
- Nihayah, D. M., & Diastuti, R. (2023). The role of green budgeting on environmental quality in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 12(2), 217–230. <https://doi.org/10.15294/edaj.v12i2.68929>
- OECD. (2021). *Green budgeting framework: Highlights*. OECD. <https://www.oecd.org/environment/green-budgeting/>
- Pojar, S. (2022). Environmental assessments within green budgeting. *European Commission*, 8022(December). <https://doi.org/10.2765/745591>
- Priadana, H. M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.
- Ritonga, I. T. (2014). *Modelling local government financial conditions in Indonesia*. [Preprint].
- Rofifah, D. (2020). *Kebijakan pengelolaan anggaran dana otonomi khusus*. Unimal Press.
- Roslina, R., Surya, Z., & Adjie, G. (2021). Analisa kebijakan anggaran dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat operasional pertambangan emas skala kecil (PESK) di Kabupaten XYZ. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 7–11. <https://doi.org/10.32520/jak.v10i1.1650>
- Saaty, T. L. (1993). *Pengambilan keputusan bagi para pemimpin*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches to implementation research: A critical analysis and suggested synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48. <https://doi.org/10.1017/S0143814X00003846>
- Shinta, T. D., & Fidiana. (2023). Implementasi green budgeting pada pemerintah daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(8), 1–17.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Survey, P., Survey, B., & Budgeting, C. (2019). Budgeting practices and procedures. *Government at a Glance*, 114–116. <https://doi.org/10.1787/g211e6d7b7-en>
- Taufiqurrahman, M. A., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran pada badan daerah Kabupaten Bojonegoro. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), 4648–4658.
- Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4), 217–222.
- Utomo, S. W., Sulistyowati, L., & Yulianto, G. (2015). *Teori dan konsep sistem manajemen lingkungan*. Modul 1, 1–39. Tersedia pada: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSLK5202-M1.pdf>
- Wahab, A. (2001). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. (2021). *Green budgeting: Konsep anggaran keuangan daerah berbasis isu lingkungan hidup menuju local sustainable goals*.
- Wilkinson, D., Benson, D., & Jordan, A. (2008). Green budgeting. In *Innovation in*

- environmental policy? Integrating the environment for sustainability* (pp. 70–92). Cheltenham: Edward Elgar.
- Yudo, S., & Said, N. I. (2018). Kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik di Indonesia. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 10(2), 58–75. <https://doi.org/10.29122/jrl.v10i2.2847>
- Zahra, et al. (2016). Effectiveness of deconcentration budget policy toward environmental quality improvement. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 6(2), 200–210. <https://doi.org/10.19081/jpsl.2016.6.2.200>